

06 Ruang Utama

Reputasi Global BPOM
dalam Kepemimpinan
Sang Ilmuwan

22 Ruang Belajar

Jangan Asal Gunakan
Injeksi Estetik dan Etiket
Biru Kosmetik

46 Ruang Tamu

Menjulung, Membumi,
Mengakar Dari Ilmuwan
Menjadi Birokrat



**Wajah Baru
Pengawasan Obat
dan Makanan**



MaPOM

Majalah Pengawasan Obat dan Makanan

Vol.6/No.3/2024

ISSN 2808-4683



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi majalah dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin dari penerbit.



Untuk izin memperbanyak MaPOM dengan jumlah tertentu, **serta saran dan masukan untuk MaPOM**, silakan menghubungi tim redaksi MaPOM lewat *scan barcode* berikut:



Tim redaksi akan memberikan **hadiah menarik untuk 3 pemberi saran/masukan yang paling kreatif.**

Susunan Redaksi

Pengarah

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D

Pembina

Irjen. Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H.

Pemimpin Redaksi

Lynda Kurnia Wardhani, S.E., M.Si.

Tim Redaksi

Eka Rosmalasari, S.Si., Apt., M.K.M.
Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm, Apt
Gita Indah Nundya Sari, S.Farm., Apt
Fathan Nur Hamidi, S.Sos.I
Dian Hermawati, S.Farm, Apt

Tim Sekretariat

Tri Kuswantoro, S.E
Zulfikar Rasyad Listiyanto, S.Kom
Fadila Utami, S.Ak
Faisal Nur Jabbar, A.Md
Armacata, S.Tr.Ikom

Tim Penulis

Anggita Tyaswuri, S.Farm
Benny Robin, S.E
Christy Cecilia S.N, S.Farm., Apt
Devi Oktaviani, S.I.Kom
Erika Juliani, A.Md
Fadlan Khaerul Anam, S.Sos
Lucky Argasetya, S.Farm., Apt, M.Farm.Klin
Marina Tata Ulina, S.Si, Apt, M.Sc
Maulvi Muhammad Adib, S.Sos
Melia Kurniawati, S. Farm
Muhammad Rizky, S.E
Mulia Sondari, S.Si, Apt.,M.Sc
Nelly Lutfhiani Rachman, S.Sos
Nesha Priskila Roulina Mutiara Sitompul, S.TP
Putri Damai Lestari, S.Farm, Apt., M.K.M
Putri Wiyana Utami, S.I.Kom
Rahma Yulianti, S.Si, Apt, MAB
Randi Dian Saputra, S.Si
Rizan Febriana Pratama, S.Farm, Apt
Salsabila Nadien, S.Gz
Tri Handayani, S.Farm
Vina Angerina Panjaitan, S.Si
Yanuar Rahman, S.Ikom
Zein Fadhlurrahman, S.T.P

Alamat

Jl. Percetakan Negara Nomor 23,
Jakarta - 10560, Indonesia
Phone: (+62)21 4244691/42883309/42883462
FAX: (+62)21 4263333
SMS: (+62) 8121 9999 533

Salam Sehat,

Berperan krusial sebagai lembaga pengawas obat dan makanan nasional, BPOM terus berupaya mengukuhkan kredibilitasnya hingga mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Salah satu tonggak penting yang tengah diupayakan adalah meraih akreditasi WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Perjalanan BPOM untuk bisa masuk dalam WLA menjadi topik utama dalam Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.3/2024 kali ini. Dalam rubrik Ruang Utama, pembaca disuguhi perjuangan BPOM membuktikan kredibilitas sistem pengawasan, profesionalitas sumber daya manusia, serta keselarasan regulasi dengan standar internasional.

Selain WLA, Ruang Utama juga menyediakan tulisan tentang penandatanganan Grant Agreement antara BPOM dengan WHO. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan akses pengawasan obat dan makanan untuk *Biennium 2024–2025*. Ada juga tulisan tentang kisah perjalanan, harapan, dan pencapaian Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam kepemimpinannya membawa BPOM menembus reputasi global.

Cerita perjalanan Taruna Ikrar juga dibahas dalam rubrik Ruang Tamu, termasuk bagaimana perjalanan akademik sebagai ilmuwan, transisi ke dunia birokrasi, dan kepemimpinannya di BPOM. Juga diungkapkan tentang filosofi manajerial Taruna Ikrar yang disebut sebagai prinsip menjulang, membumi, dan mengakar.

Dalam Rubrik Jendela, terdapat tulisan *Advanced Therapy Medicinal Products* sebuah harapan baru pengobatan berbasis sel, genetik, dan jaringan; kehadiran BPOM pada Indonesia-Africa Forum (IAF) II; peran BPOM mengawal percepatan hilirisasi penelitian bahan alam menuju fitofarmaka; penggunaan AI dalam proses registrasi pangan olahan; dan peran BPOM mengawal produksi dan distribusi sorgum dari hulu hingga hilir.

Di tengah maraknya peredaran dan pembahasan mengenai kosmetik dan *skincare* di masyarakat, MAPOM kali ini juga mengajak pembaca untuk lebih cerdas dan teliti dalam menggunakan injeksi estetik dan etiket biru kosmetik. Rubrik ruang belajar juga menyediakan informasi tentang langkah menjadi pelaku usaha kontrak produksi kosmetik. Ada juga tulisan tentang pencantuman *nutri-level* pada pangan olahan dan kunjungan BPOM ke Maluku untuk mengajak generasi muda Maluku jadi konsumen cerdas.

Tak kalah menarik adalah cerita program BPOM “Meet Market Nuansa” dalam memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) obat bahan alam agar mampu memenuhi standar yang sesuai ketentuan. Selain itu ada kisah menarik dari suatu desa wisata Negeri Rutong di Ambon yang masih terus menjaga kelestarian alam dan budayanya.

Pada edisi kali ini, segenap awak redaksi MaPOM mengajak seluruh pembaca untuk bersama mendukung transformasi pengawasan obat dan makanan. Pengawasan yang tangguh berkontribusi besar dalam membangun daya saing bangsa di kancah global. ■

Pemimpin Redaksi MaPOM



BERANDA 03

HALOBPOM 05

RUANG UTAMA 06

Reputasi Global BPOM dalam Kepemimpinan Sang Ilmuwan
Grant Agreement BPOM dan WHO 06

Menuju Transformasi Pengawasan Berstandar Global 10

Memantapkan Peran Global Menuju WHO *Listed Authority*

Tingkatkan Daya Saing Produk Vaksin Indonesia di Dunia 12

REN 2024: Optimalisasi Kinerja Menuju Organisasi Kelas Dunia 17

RUANG BELAJAR 22

Jangan Asal Gunakan Injeksi Estetik dan Etiket Biru Kosmetik 22

Nutri-Level: Format Baru Pelabelan Gizi pada Pangan Olahan 24

Bisnis Kontrak Produksi Kosmetik Wajib Taat Regulasi 26

BPOM Menyapa Maluku Jadikan Generasi Muda Konsumen Cerdas 28

JENDELA 32

Kawal Percepatan Hilirisasi 32

Penelitian Bahan Alam Menuju Fitofarmaka 32

Masa Depan Registrasi Pangan Olahan:

AI sebagai Solusi Efisiensi Registrasi 34

Sorgum: Potensi Bahan Pangan Lokal Bernilai Ekonomi Tinggi
untuk Ketahanan Pangan 36

Peran Penting BPOM di Indonesia Africa Forum (IAF) 2024:

Tingkatkan Akses Pasar dan Diplomasi Strategis 38

Advanced Therapy Medicinal Products:

Harapan Baru Pengobatan Berbasis Sel, Genetik, dan Jaringan 40

BINGKAI 43

Bingah Akhir Tahun 2024:
Rayakan Sederet Prestasi BPOM, Menuju Regulator Kelas Dunia 43

RUANG TAMU 46

Menjulung, Membumi, Mengakar Dari Ilmuwan Menjadi Birokrat 46

GALERI 48

DAPUR UMKM 50

Membangun Kualitas Obat Tradisional:
Sinergi UMK dan Sistem Tata Udara 50

RUANG KERJA 52

Sinergi Lintas Negara: Indonesia-Korea Selatan Tegas,
Lawan Kejahatan Obat dan Pangan Berbahaya 52

Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Suplemen
Kesehatan di Kawasan ASEAN 54

FILLER 59

Pesona Negeri Rutong: Sejuta Keindahan di Timur Indonesia 59



06



22



38



61

Tanya HALOBPOM :
Bagaimana alur registrasi pangan olahan yang telah terintegrasi dengan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)?

HALOBPOM Menjawab :

BPOM melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah melakukan pengembangan aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (ereg-RBA) yang telah terintegrasi dengan OSS-RBA, yaitu aplikasi <https://ereg-rba.pom.go.id/>.

Alur registrasi pangan olahan dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha memiliki nomor induk berusaha (NIB) versi RBA.
2. Mengajukan izin penerapan cara produksi pangan olahan

yang baik (CPPOB) untuk pangan olahan produksi di dalam negeri atau Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk produk pangan olahan impor.

3. Mengajukan pendaftaran pangan olahan yang dilakukan secara online melalui akun OSS (oss.go.id) dan akan diarahkan secara sistem ke subsite ereg-rba.pom.go.id

Untuk memudahkan pelaku usaha dalam memahami alur registrasi pangan Olahan di ereg-RBA, telah diterbitkan Buku Saku Registrasi Officer Pangan Olahan, yang dapat diakses melalui subsite <https://registrasipangan.pom.go.id>, pada menu Handbook & Pedoman.

Link Buku Saku :

[https://registrasipangan.pom.go.id/storage/medialain/Registrasi-Pangan-Buku%20Saku%20RO%20Final_040624%20\(2\).pdf](https://registrasipangan.pom.go.id/storage/medialain/Registrasi-Pangan-Buku%20Saku%20RO%20Final_040624%20(2).pdf)

Tanya HALOBPOM :
Apakah hasil pemeriksaan sarana oleh Balai Besar/Balai POM setempat dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan registrasi akun perusahaan pangan olahan produksi dalam negeri di ereg-rba.pom.go.id?

HALOBPOM Menjawab :

Persyaratan registrasi akun perusahaan pada aplikasi e-registration pangan olahan dengan menggunakan hasil pemeriksaan BPOM terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB,

sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya wajib menggunakan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB). Produsen pangan olahan yang belum memiliki IP CPPOB wajib segera mengajukan permohonan penerbitan IP CPPOB untuk setiap lokasi sarana produksi dan/atau proses produksi pangan olahan.

Informasi selengkapnya dapat disimak pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Tanya HALOBPOM :
Bagaimana cara pemenuhan komitmen pada registrasi pangan risiko Menengah Rendah (MR)?

HALOBPOM Menjawab :

1. Terdapat tiga tingkat penilaian risiko pangan, yaitu risiko tinggi (T), risiko menengah tinggi (MT), dan risiko menengah rendah (MR).
2. Pangan olahan risiko menengah rendah (MR) memiliki kewajiban pemenuhan komitmen paling lama 12 bulan sejak nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) diterbitkan.
3. Pemenuhan komitmen diajukan melalui ereg-rba.pom.go.id pada menu Pemenuhan Komitmen.

4. Agar diperhatikan titik kritis evaluasi pemenuhan komitmen yaitu kesesuaian data produk, kesesuaian daftar bahan/komposisi yang di-input dengan yang diunggah, dan kesesuaian rancangan label.

5. Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah menerbitkan informasi panduan pemenuhan komitmen pada registrasi pangan risiko menengah rendah yang dapat dilihat pada handbook Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah, yang dapat diakses melalui subsite <https://registrasipangan.pom.go.id>, pada menu Handbook & Pedoman.

Link Handbook :

<https://registrasipangan.pom.go.id/storage/medialain/Registrasi-Pangan-FINAL%20ISBN%20Handbook%20MR.pdf>

Tanya HALOBPOM :
Bagaimana cara memperoleh ID Izin OSS yang sesuai dengan PB-UMKU produk?

HALOBPOM Menjawab :

Aplikasi ereg-RBA sudah terintegrasi dengan sistem OSS sehingga dalam proses registrasi pangan olahan diperlukan ID

izin OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh ID izin OSS melalui <https://oss.go.id/> dengan pemilihan perizinan PB-UMKU yang harus disesuaikan dengan tingkat risiko pangan olahan yang didaftarkan.

Tanya HALOBPOM :
Apakah buah dan sayur segar diawasi oleh BPOM?

HALOBPOM Menjawab :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, pengawasan

terhadap keamanan pangan segar hasil pertanian, termasuk buah dan sayuran, merupakan kewenangan Kementerian Pertanian, melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di pusat dan daerah yang dibentuk sejak tahun 2008.



Penulis : Fadlan Khaerul Anam
Editor : Fathan Nur Hamidi

Reputasi Global BPOM dalam Kepemimpinan Sang Ilmuwan

Kini, seorang ilmuwan turun gunung tunaikan amanah negeri memimpin BPOM. Kiprahnya di tiga benua dengan sederet pengalamannya menjadi bekal penting untuk membawa BPOM menembus reputasi global. Bagaimana kilas balik kisahnya, harapan-harapannya, dan apa yang sudah dicapainya?



Kepala BPOM Taruna Ikrar menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta (19/8/2024).

D i hari yang sibuk itu Senin, 19 Agustus 2024, Taruna Ikrar memenuhi panggilan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Pria berdarah merah dibalut jas hitam berdiri tegak di depan Presiden RI seraya mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala BPOM. Taruna Ikrar seketika mengambil pena menandatangani berita acara pelantikan. Sorot matanya yang tajam di balik *frame* kacamata hitam yang dia gunakan menambah kesan bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Kesan intelektual memang melekat dalam dirinya sebagai seorang ilmuwan yang telah menjelajah 3 benua.

Setelah bertemu Presiden RI, dia langsung berdiri di podium. Pengeras suara berlabel nama-nama media sudah berjejer di podium tersebut, tampak

menunggu kata per kata yang akan diucapkan. Dengan gerak tangan yang meyakinkan, dia menguntai kalimat lugas menegaskan awal karirnya sebagai pemimpin BPOM. "Ini merupakan amanah yang berat, bertanggung jawab untuk pengawasan obat dan makanan. Ini tentu tanggung jawab dan bebannya sangat berat terhadap 280 juta penduduk Indonesia saat ini," pernyataan serius dan menatap pada insan pers yang hadir saat itu.

Ilmuwan yang Penuhi Panggilan Pengabdian

Taruna Ikrar adalah dokter dan ilmuwan yang mendalami bidang kefarmasian, jantung, dan saraf. Beliau pernah menjabat sebagai spesialis laboratorium di Departemen Anatomi dan

Neurobiologi di University of California di Irvine, Amerika Serikat. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2000--2003.

Nama sohor ilmuwan ini telah tercatat di laman Google Scholar. Karya beliau telah dikutip sebanyak 1.775 kali dalam beragam jurnal bidang neurosains. Karya nya yang paling banyak dikutip diterbitkan jurnal terkemuka Nature berjudul *A disinhibitory microcircuit initiates critical-period plasticity in the visual cortex*. Penelitian ini berkaitan dengan plastisitas dominasi okular (ODP) yaitu kehilangan penglihatan pada satu mata secara permanen mengurangi respons otak terhadap mata tersebut. Penelitiannya mengungkapkan peran aktivitas neuron penghambat yang disebut PV interneuron dalam memulihkan fungsi mata di korteks visual utama.

Penelitian lainnya juga masih tentang peran aktivitas neuron dalam karya berjudul *Adult neurogenesis modifies excitability of the dentate gyrus*. Penelitiannya menunjukkan aktivitas neuron di lapisan granule cell (GCL) untuk mengurangi tumpang tindih informasi dan mencegah gangguan ingatan. Penelitian ini sangat penting untuk mengungkap proses yang terjadi di girus dentata yaitu bagian dari otak yang berperan dalam pembentukan memori episodik dan eksplorasi lingkungan baru.

Dia bukan ilmuwan menara gading. Kepedulian yang tinggi akan negeri sudah terlihat. Pada 2016, Taruna Ikrar menerbitkan buku berjudul "Ilmu Neurosains Modern" dalam bahasa Indonesia yang menjadi rujukan bidang neurosains dalam negeri. Dalam buku itu dibahas mengenai pendekatan



Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama jajaran mengunjungi Gedung Pelayanan Publik BPOM, Jakarta (19/8/2024).

dalam mempelajari otak manusia menggunakan teknik *noninvasive* seperti *neuroimaging* fungsional atau rekaman *electroencephalogram* (EEG): dan mempelajari sistem sirkuit motorik, dilakukan dengan pendekatan fungsional, analisis morfologi anatomi, serta genetik. Buku itu juga membahas mengenai struktur neuron, sintesis protein dalam jaringan saraf (neuron), jaringan penunjang (*cytoskeleton neuron*), regenerasi sistem saraf dan aktivitas saraf ditentukan oleh aksi potensial, organisasi dan sel saraf, organisasi struktural sistem saraf.

Taruna Ikrar juga berkontribusi pada dunia kedokteran di masa krisis COVID-19. Dia terlibat dalam pengembangan terapi sel dendritik. Lewat karyanya berjudul *A personal COVID-19 dendritic cell vaccine made at point-of-care*, dia menunjukkan bahwa terdapat peningkatan antibodi pada 70% dari 31 orang yang mengikuti terapi sel dendritik dengan bahan tambahan setelah 28 hari. Penelitian ini juga menunjukkan respons kekebalan seluler meningkat pada lebih dari 94% dari 145 orang yang mengikuti terapi sel dendritik tanpa bahan tambahan dalam 14 hari.

Dengan prestasi mentereng tersebut, tampaknya presiden Jokowi telah memantapkan hati untuk melantik dan mengambil sumpah ilmuwan neurosains ini sebagai Kepala BPOM. Pelantikan dan pengambilan sumpah bersamaan dengan momen *reshuffle* kabinet Indonesia Maju. Keputusan pengangkatan Kepala BPOM ini didasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/PPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Strategi Sang Ilmuwan untuk BPOM

Usai pelantikan hari itu, berita terus bermunculan seperti apa Kepala BPOM yang baru. Tibalah iring-iringan mobil yang tampak asing berhenti di depan Gedung Garuda BPOM. Taruna Ikrar langsung hadir ke Kantor BPOM di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.

Taruna Ikrar menyambangi fasilitas-fasilitas kerja di lingkungan BPOM pusat. Kunjungan tersebut didampingi oleh Sekretaris Utama Rita Mahyona beserta jajaran eselon I lainnya. Sembari melakukan kunjungan, pimpinan Eselon I BPOM berdiskusi dengan Kepala BPOM mengenai fungsi dari sarana prasarana dan bisnis proses di BPOM.

Taruna Ikrar menyambangi fasilitas-fasilitas kerja yang terdapat di lingkungan BPOM Pusat, yaitu BPOM Command Center di Gedung Garuda; Unit

Pelayanan Publik di Gedung Athena; lanjut ke lokasi Layanan Contact Center HALOBPOM, *employee corner*, dan *gym* di Gedung Merah Putih. Kepala BPOM juga mengunjungi Studio Broadcast PN23 dan Laboratorium Digital Forensik di Gedung Panacea.

Senyum sumringah terukir di wajah Taruna Ikrar saat bertemu dengan Kepala BPOM periode 2016–2023 Penny K. Lukito di *employee corner* Gedung Merah Putih. Sambil berceloteh beliau bilang akan berdiskusi banyak dengan Penny K. Lukito. Beliau bertukar senyum dengan jajaran Eselon II di Gedung Pelayanan Publik BPOM. Dia menyampaikan strateginya untuk memimpin BPOM.

“Ada 5 prioritas utama yang menjadi *highlight* pimpinan kita, Bapak Presiden RI. Pertama, mengenai nutrisi atau makanan, kita memastikan makanan atau produk minuman dan sebagainya yang dikonsumsi rakyat itu aman sesuai dengan kandungan gizi, baik, dan sehat. Kedua, berbicara tentang obat, obat itu kan luas ada obat *chemical*, produk biologi, termasuk yang kita sebut fitofarmaka atau obat tradisional, itu juga harus menjadi perhatian,” paparnya.

Ketiga, Kepala BPOM juga menyoroti perlu adanya inovasi obat-obat baru. Keempat, untuk mempercepat proses uji klinik obat hingga rilis dan dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kelima, untuk memajukan reputasi Indonesia melalui BPOM sebagai regulator pengawas obat dan makanan dapat sejajar di tingkat global. “Reputasi Indonesia sangat penting karena Indonesia merupakan negara berpenduduk ke-4 terbesar di dunia, negara terbesar di Asia Tenggara. Tapi



Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan brief address dalam Pertemuan dengan tema "Indonesia Self Benchmarking Feedback & Next Step dalam rangka BPOM menuju WHO Listed Authority", Jakarta, Kamis (7/11/2024)

kita masih dianggap belum setara dengan negara maju. Nah! ini waktunya Indonesia membuktikan bahwa kita [BPOM] setara dengan FDA di negara-negara maju,” pungkas Taruna

Untuk mencapai 5 prioritas itu, Taruna Ikrar akan meningkatkan koordinasi antar lembaga, antara lain dengan Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Gizi Nasional. “Ini perlu sinkronisasi secara baik. Selain itu, perlu adanya regulasi yang baik agar harga obat dalam negeri tidak mahal dari negara tetangga. Yang bikin mahal karena bahan baku obat masih impor hampir 90%,” tuturnya lagi.

100 Hari Kepemimpinan Taruna Ikrar Menjulung

Taruna Ikrar seperti para ilmuwan, memegang janji memenuhi ekspektasi. Ilmuwan yang memiliki prinsip menjulang, membumi, dan mengakar ini sedang bersiap untuk pengakuan BPOM ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan masuk dalam WHO Listed Authority (WLA). WLA merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) yang transparan dan berbasis bukti untuk menilai dan menetapkan *regulatory authorities* termasuk ke dalam daftar negara yang memiliki kinerja *advance* untuk diakui secara global. Pengakuan ini akan berpengaruh dalam memberikan kepercayaan yang besar terhadap produk-produk Indonesia, dalam hal ini vaksin yang diawasi oleh BPOM.

BPOM telah menyerahkan *self-assessment* kepada WHO pada akhir Juli 2024. Selanjutnya, data *self-assessment* tersebut dinilai WHO pada akhir 2024 atau awal 2025. Di hadapan perwakilan WHO, Taruna Ikrar menyampaikan selama setahun terakhir, BPOM telah melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan WHO Global Benchmarking Tools (WHO GBT) untuk sub-indikator tingkat kematangan 4 (maturity level/ML4) dan indikator evaluasi kinerja (PE) WLA di 9 fungsi regulasi.

“Kami sepenuhnya siap untuk melanjutkan evaluasi dan berkomitmen untuk kerja sama dan transparansi di setiap tahap,” tegas Kepala BPOM dalam *virtual technical meeting* “Indonesia Self Benchmarking Feedback & Next Step dalam rangka BPOM menjadi WHO Listed Authority” pada 7 November 2024.

Secara garis besar, hasil reвью WHO terhadap WHO GBT yang disampaikan BPOM menyatakan bahwa BPOM



Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan pernyataan pers mengenai penyerahan izin edar Etapidi dan Brukinsa, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

telah bisa menyediakan dokumen yang diperlukan dengan baik dan terstruktur. Pemaparan terkait perubahan sejak WHO GBT Benchmarking pada tahun 2018 sangat transparan, tampak adanya peningkatan yang signifikan. WHO memerlukan konfirmasi terhadap fungsi-fungsi yang terdapat pada GBT. Setelah pertemuan ini, masih terdapat beberapa tahapan yang akan dilewati BPOM hingga proses penilaian akhir dan pemberian keputusan.

Di tahun 2025, Taruna Ikrar sedang bersiap menunggu hasil penilaian WLA. Namun demikian BPOM masih harus melewati tahapan selanjutnya dalam memperoleh WLA. Pada 6 Januari 2025, BPOM menyampaikan dokumen *update list* rencana GCP *inspection* vaksin, permohonan registrasi vaksin sejak 2019, permohonan uji klinik vaksin sejak 2019. Pada akhir Januari 2025, dilakukan *virtual meeting* dengan WHO untuk mendiskusikan dan memfinalisasi hasil reвью terhadap masing-masing fungsi. Ilmuwan 3 anak ini punya mimpi besar supaya BPOM bisa menjadi lembaga yang dihormati di dunia internasional.

Membumi

Impiannya tak hanya menjulang. Taruna Ikrar ingin BPOM membumi dengan melayani lebih banyak kebutuhan bangsa akan obat dan makanan yang aman. Belum genap 100 hari, BPOM telah menyetujui izin edar untuk 2 produk baru terapi kanker di Indonesia, yaitu Etapidi dan Brukinsa pada 10 Desember 2024. Etapidi dan Brukinsa merupakan produk obat inovatif yang dikembangkan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana) dan pengembangan pengobatan

onkologi BeiGene untuk perawatan terapi kanker, khususnya kanker paru dan kanker esofagus.

Pemberian izin edar ini bukti nyata Taruna Ikrar memenuhi janjinya. Dia berkomitmen mempercepat akses masyarakat Indonesia pada obat inovatif melalui pemberian izin edar yang awalnya 300 hari kerja menjadi hanya 120 hari kerja. Taruna Ikrar juga mengupayakan percepatan proses registrasi obat dengan menambah jumlah anggota Komite Nasional Penilai Obat. Penambahan jumlah anggota tersebut karena semakin banyaknya permohonan nomor izin edar yang diterima BPOM tiap bulannya. Penambahan anggota Komite Nasional Penilai Obat juga bertujuan membantu para pakar yang tergabung dalam tim agar bisa menilai beragam produk obat sesuai kepakaran masing-masing.

Taruna Ikrar juga melakukan komunikasi untuk mempermudah masuknya obat inovatif ke dalam negeri. “BPOM telah berkomunikasi dengan US FDA melalui fasilitasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk mendorong masuknya beragam obat inovatif yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan akses komunikasi di tingkat global, saya berharap BPOM bisa naik kelas dalam *level of maturity* menjadi level 4 dan menjadi WHO Listed Authority tahun depan,” tutur Taruna Ikrar.

Taruna Ikrar bukan hanya *membumi* melalui percepatan akses pada produk yang aman, tapi sekaligus menutup tegas peredaran produk ilegal. Pada 13 Desember 2024, beliau terbang ke Semarang untuk memimpin pemusnahan barang bukti hasil operasi penertiban



Kepala B POM Taruna Ikrar memberikan edukasi pangan aman pada pelajar SMAN 6 Ambon, Maluku (30/11/2024).

negeri. Taruna Ikrar merekatkan hati jajarannya lewat menyapa jajarannya di luar Jawa. Dia telah mengunjungi beberapa kantor UPT BPOM seperti Balai POM di Ambon. Taruna Ikrar berdialog menyerap aspirasi dan memberikan solusi untuk para personil Balai POM di Ambon terkait tantangan pengawasan obat dan makanan.

Dalam rangkaian #BPOMMenyapa dia juga mendatangi SMAN 6 Ambon untuk mengedukasi pelajar menjadi generasi sehat yang sadar obat dan makanan aman. Taruna Ikrar juga bertemu dengan lintas sektor di Kantor Gubernur Maluku dalam kegiatan #BPOMMenyapaStakeholder yang bertema "Growing Together: Membangun Kolaborasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemberdayaan Masyarakat di Maluku".

Sudah 100 hari, sang ilmuwan berpikrah untuk negeri. 100 hari telah menorehkan ragam jejak dan prestasi. Perjalanan masih panjang: tahun 2025 menunggu kepastian BPOM 'menjulangi' masuk ke dalam WLA, membumi lewat makin mudah akses obat inovatif dan penegakan hukum terhadap produk ilegal, dan masih banyak kantor wilayah BPOM yang perlu disapa supaya makin 'mengakar' semangat transformasi yang dibawa sang ilmuwan. ■

obat-obat tertentu ilegal di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang. Barang bukti yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi mencapai Rp317 miliar. Obat-obat tertentu tersebut positif mengandung trihexyphenidyl, tramadol, dan dekstrometorfan. Ketiganya merupakan obat yang sering ditemui disalahgunakan masyarakat.

Untuk produk kosmetik, periode Oktober-November 2024, BPOM telah melakukan intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan. Hasilnya, ditemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi dan peredaran kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya dengan nilai temuan lebih dari Rp8,91 miliar. Sebagian besar kosmetik impor ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya didistribusikan dan dipromosikan terutama melalui e-commerce.

Taruna Ikrar juga memiliki perhatian besar terhadap peredaran pangan olahan. Hasil intensifikasi pengawasan pangan olahan selama Natal dan Tahun Baru, BPOM menemukan 838 sarana (27,94%) menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), dengan jumlah total temuan sebanyak 86.883 pieces. Jumlah sarana yang diperiksa meningkat sebesar 23% dengan total sarana yang diperiksa sebanyak 2.999 sarana. Dibandingkan dengan intensifikasi pengawasan pangan tahun lalu yang

menyasar 2.438 sarana.

Mengakar

Akhirnya, BPOM tak akan menjulang dan membumi, jika tidak mengakar di hati seluruh jajarannya hingga di pelosok



Kepala B POM Taruna Ikrar memeriksa barang bukti hasil operasi penertiban obat-obat tertentu ilegal di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang, (13/12/2024).



Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Perwakilan WHO Representative Indonesia Roderick Salenga pada penandatanganan Grant Agreement BPOM dan WHO di Jakarta, (7/10/2024).



Penulis : Putri Wiyana Utami
Editor : Fathan Nur Hamidi

Grant Agreement BPOM dan WHO Menuju Transformasi Pengawasan Berstandar Global

Grant Agreement BPOM dan WHO menjadi tonggak penting dalam meningkatkan akses pengawasan obat dan makanan untuk Biennium 2024--2025. Kolaborasi strategis ini tidak hanya memperkuat kapasitas pengawasan BPOM, tetapi juga mendorong transformasi sistem regulasi nasional agar lebih selaras dengan standar global.

Kerjasama internasional memainkan peranan penting dalam pengawasan obat dan makanan. Peredaran produk obat dan makanan lintas negara (*borderless*) membuat otoritas regulatori di sejumlah negara merapat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi payung besar yang menaungi isu-isu kesehatan global. Karena itu, BPOM terus menjalin kerjasama sama dengan WHO. Salah satunya melalui penandatanganan *Grant Agreement* pada 7 Oktober 2024 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kolaborasi ini bertujuan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan kesehatan nasional sesuai RPJMN, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan akses lebih baik terhadap produk medis yang aman, berkualitas, dan terjamin mutunya. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan obat dan makan berstandar internasional. Ini juga merupakan upaya konkret dalam memitigasi risiko terhadap penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi standar, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

“Kami percaya bahwa kerjasama ini akan memperkuat sistem pengawasan kita, membangun kepercayaan publik terhadap produk yang beredar di Indonesia, dan mendukung transformasi sektor kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam sambutannya yang mendapat apresiasi hangat dari para undangan.”

Sejak dimulai pada 2020, program hibah BPOM dan WHO telah menunjukkan perkembangan signifikan. Kini, memasuki tahun ketiga, kerjasama ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat pengawasan, mempercepat akses produk medis, serta menjaga keamanan dan mutu produk, termasuk obat, vaksin, obat tradisional, dan pangan olahan baik di tingkat nasional maupun global. Dampak hibah periode 2021--2023 sangat terasa dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan, termasuk peningkatan kapasitas laboratorium, inspeksi yang lebih intensif, serta penguatan sistem digitalisasi pengawasan.

Hibah untuk Negeri

Dalam era globalisasi, pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai

dari peredaran obat substandar, resistensi antimikroba, hingga dampak pangan terhadap kesehatan masyarakat. BPOM dan WHO menyadari pentingnya memiliki sistem regulasi yang adaptif dan berbasis sains untuk menjawab berbagai ancaman tersebut.

Perwakilan WHO Representative Indonesia Roderick Salenga menyebut WHO siap bekerja sama dengan BPOM untuk memastikan standar keamanan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan dunia. “WHO sangat mengapresiasi kolaborasi erat dengan BPOM melalui *grant agreement* ini. Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat-obatan dan makanan yang aman serta berkualitas,” ujar Roderick Salenga.

Selain itu, WHO menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dalam pengawasan obat dan makanan. Banyak tantangan dalam pengawasan ini bersifat lintas batas, seperti peredaran produk ilegal atau pemalsuan obat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara BPOM, WHO, dan badan pengawas lainnya di kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu fokus utama ke depan.

Dalam *grant agreement* terbaru ini,

BPOM menerima dana hibah sebesar \$646,180. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya pada 2022–2023 sebesar \$331,800. Begitu juga jika dibandingkan periode sebelum 2022, hibah yang diterima saat ini masih lebih besar. Pada periode 2020–2021 BPOM menerima \$575,000 untuk penguatan kapasitas di bidang obat dan vaksin.

Penerimaan hibah setiap tahunnya cenderung fluktuatif tergantung pada fokus WHO. Pada 2022–2023 jumlah hibah mengalami penyesuaian karena fokus WHO saat itu pada mitigasi pandemi COVID-19. Meski terbilang rendah, BPOM tetap berhasil mengoptimalkan dana tersebut untuk mendukung pengawasan obat dan makanan secara efektif.

Saat ini hibah periode 2024--2025 yang diterima akan dimanfaatkan untuk berbagai misi inisiatif, termasuk pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai ujung tombak pengawasan obat dan makanan. Dana hibah juga akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur pengawasan, serta penyesuaian berbagai regulasi obat dan makanan dengan standar internasional.



Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan sambutan pada penandatanganan Grant Agreement BPOM dan WHO di Jakarta, (7/10/2024).



“ Melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, BPOM semakin tanggap dan cepat dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia.”

- Kepala BPOM Taruna Ikrar -

Perkuat Regulasi Tingkatkan Daya Saing

Kerja sama ini tidak hanya memperkuat pengawasan obat dan makanan, tetapi juga akan berdampak pada industri nasional. Dengan regulasi yang semakin harmonis berstandar internasional, industri nasional akan lebih mudah menembus pasar global. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk farmasi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industri berbasis riset serta inovasi.

Dukungan WHO turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas laboratorium pengujian BPOM, baik di tingkat pusat maupun UPT, sehingga memperkuat pengawasan terhadap produk obat dan pangan olahan lokal agar memenuhi standar keamanan dan kualitas internasional. Langkah ini diharapkan menarik lebih banyak investasi di sektor farmasi, obat tradisional, dan pangan olahan serta membuka peluang kerja bagi tenaga profesional di bidang kesehatan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai pencapaian penting, seperti peningkatan daya saing industri farmasi nasional, peningkatan kualitas laboratorium pengujian, serta meningkatnya kepercayaan internasional terhadap produk kesehatan Indonesia. “Kami percaya bahwa kerja sama ini akan semakin memperkuat sistem regulasi di Indonesia dan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Ini juga akan memperkuat posisi BPOM di tingkat internasional,” jelas Roderick Salenga.

Dalam jangka panjang, kerja sama

ini dapat meningkatkan investasi di sektor farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Investor dan produsen global akan lebih percaya untuk bekerja sama dengan industri obat dan makanan dalam negeri. Hal ini tidak hanya memperkuat ekosistem kesehatan di Indonesia, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, BPOM berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas kerja sama dengan berbagai mitra internasional. Dengan sinergi yang kuat bersama WHO, BPOM memastikan setiap produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kualitas dan keamanan tertinggi, sekaligus mendukung sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kerja sama ini menjadi bukti nyata dedikasi BPOM dan WHO dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia. Sinergi strategis ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk obat dan makanan yang terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya. ■



Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Rita Mahyona bersama seluruh tim fungsi WLA dan tim ahli pada virtual meeting dengan WHO di Jakarta, (23/01/2025).



Penulis : Vina Angerina Panjaitan
Editor : Fathan Nur Hamidi

Memantapkan Peran Global Menuju WHO Listed Authority Tingkatkan Daya Saing Produk Vaksin Indonesia di Dunia

Berperan krusial sebagai lembaga pengawas obat dan makanan nasional, BPOM terus berupaya mengukuhkan kredibilitasnya hingga mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Salah satu tonggak penting yang tengah diupayakan adalah meraih akreditasi WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Status WLA merupakan prestasi yang sangat bergengsi dalam dunia kesehatan global. Status ini bukan semata menjadi lambang dari pengakuan dunia internasional, tetapi juga membuktikan bahwa suatu lembaga otoritas yang bertugas mengawasi obat dan/atau vaksin telah memiliki standar pengawasan yang ketat, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan berkelanjutan.

Bagi BPOM, meraih WLA berarti berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia sebagai negara dengan sistem regulatori yang advance dan membuktikan Indonesia telah setara dengan negara-negara maju. Beberapa regulatori negara maju yang telah lebih dahulu meraih WLA, seperti European Medicines Agency (EMA) Uni Eropa, Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, Swissmedic, Ministry of Food and

Drug Safety (MFDS) Korea, dan Health Sciences Authority (HSA) Singapura.

Perjalanan menuju WLA tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini menjadi tantangan besar bagi BPOM karena harus membuktikan kredibilitas sistem pengawasan, profesionalitas sumber daya manusia, serta keselarasan regulasi dengan standar internasional. Kendati demikian, meraih WLA bukanlah hal yang mustahil. BPOM optimis dan

WLA Framework

- 01 Panduan operasional: WHO Operational guidance for evaluating and publicly designating regulatory authorities as WHO-listed authorities
- 02 Dokumen kebijakan/Policy Document: Evaluating and publicly designating regulatory authorities as WHO-listed authorities
- 03 Manual for performance evaluation of regulatory authorities seeking designation as WHO-listed authorities (selanjutnya disebut sebagai "PE manual")
- 04 WHO Global Benchmarking Tool (GBT) and manual.

berkomitmen untuk membawa Indonesia menjadi otoritas regulatori berkelas dunia, transparan, dan berbasis bukti.

Kerangka kerja WLA (*WLA framework*) disusun melalui serangkaian konsultasi internasional dengan negara anggota dan *stakeholders* terkait hingga tahap konsultasi publik dan pengujian lapangan terhadap kerangka rancangan WLA. *WLA framework* tersebut disusun berdasarkan WHO Assembly resolution 67.20 – Regulatory system strengthening for medical products serta WHO Roadmap for access to medicines, vaccines and health products 2019–2023: comprehensive support for access to medicines, vaccines and other health products.

Penerapan *good regulatory practice* (GRP) menjadi elemen krusial dalam

proses ini. GRP adalah serangkaian prinsip, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas regulasi. Dengan menerapkan GRP secara konsisten, suatu *national regulatory authority* (NRA) dapat memastikan proses regulasi dilakukan secara transparan, efisien, berbasis bukti, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan lintas sektor terhadap kredibilitas dan *independency* suatu NRA.

Perjalanan menuju WLA dimulai dari *global benchmarking tools* (GBT) yang digunakan untuk menilai tingkat *maturity level* (ML) suatu otoritas regulatori. Untuk dapat meraih predikat WLA, sebuah NRA harus mencapai *maturity level* 3 atau 4

terlebih dahulu sebelum mengajukan *expression of interest* (EOI) terhadap WLA secara sukarela kepada WHO.

Jalan Panjang Menuju WLA

Sebuah capaian besar bagi Indonesia, pada 2018 BPOM berhasil masuk ke dalam daftar *transitional WLA* (*tWLA*) dengan perolehan nilai ML 3 untuk sistem regulatori vaksin, dengan didukung 8 aspek positif BPOM yang diapresiasi WHO. Selain itu, WHO juga mengidentifikasi 8 rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut, diantaranya efisiensi regulasi, peningkatan laporan data keamanan obat, dan fleksibilitas dalam *reliance* dengan referensi otoritas global.

Dengan status *maturity level* 3, BPOM memiliki waktu hingga 2027 untuk mengajukan diri sebagai WLA tanpa perlu proses *rebenchmarking*. Selain itu, melalui kesuksesan BPOM dalam mempertahankan status keanggotaan Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PICs) terkait kesetaraan standar penerapan CPOB dan WHO-Contracted Laboratory sejak 2021 di tingkat global terhadap 3 area indikator WLA juga menjadi faktor pendukung. Ketiganya dinilai sudah memenuhi standar sehingga tidak diperlukan tahapan evaluasi kembali, yaitu *regulatory inspection* (GMP), *laboratory testing* (LT) dan *lot*

Apresiasi WHO Terhadap Aspek Positif BPOM

- 01 **Pembaruan Regulasi:** peningkatan dan pembaruan peraturan yang mendukung pengawasan regulatori.
- 02 **Perubahan Organisasi:** penambahan Direktorat Siber Obat dan Makanan untuk menangani peredaran produk obat, termasuk vaksin di *platform* digital.
- 03 **Peningkatan SDM:** peningkatan jumlah, kualitas, dan kompetensi sumber daya manusia, terutama di daerah.
- 04 **Implementasi Rencana Strategis:** BPOM berhasil mengimplementasikan sebagian Rencana Strategis 2020--2024 dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.
- 05 **Peningkatan Manajemen Mutu:** Penunjukan laboratorium BPOM sebagai laboratorium kontrak WHO untuk DTP pada tahun 2020.
- 06 **Penanganan Produk Ilegal:** Penerapan strategi komprehensif, termasuk penggunaan *2D barcode* untuk mendeteksi produk ilegal dan substandard.
- 07 **Penanganan COVID-19:** Kontribusi BPOM dalam menyediakan laboratorium BLS-2 untuk pengujian PCR sampel COVID-19 serta pengembangan laboratorium BLS-3.
- 08 **Transparansi Informasi:** Penyediaan akses informasi yang transparan melalui website BPOM terkait isu obat dan vaksin COVID-19.

release (LR). Hal ini merupakan suatu prestasi BPOM yang mampu mendukung pencapaian target WLA.

Gayung bersambut, dukungan dari pimpinan BPOM dimulai sejak Kepala BPOM ke-6 Penny Kusumastuti Lukito, kemudian Plt. Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia, hingga Kepala BPOM saat ini Taruna Ikrar. Berbagai tahapan dan proses evaluasi harus dilalui yang mencakup penilaian terhadap sistem regulatori yang dimiliki, implementasi serta capaian kinerja BPOM.

Taruna Ikrar menegaskan peran BPOM untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap produk obat dan vaksin. Karena itu sangat penting pengawasan BPOM dilakukan sesuai standar internasional. “Misi kami lebih dari sekadar menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini (WLA) bertujuan memastikan bahwa setiap penduduk Indonesia memiliki akses yang konsisten terhadap produk obat berkualitas,” ungkap Taruna Ikrar.

Diawali 8 Maret 2024, BPOM menyampaikan *expression of interest* (EOI) untuk masuk ke dalam daftar WLA terhadap produk vaksin. Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan aspek regulasi, implementasi, dan pembuktian capaian kinerja terus dilakukan melibatkan seluruh fungsi. Beberapa aspek penyempurnaan tersebut antara lain *competency framework*, pedoman teknis, penajaman mitigasi risiko dalam proses pencapaian indikator hingga sistem pengaliran data dan informasi publik. Untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, BPOM juga aktif berdiskusi dengan narasumber ahli dari setiap fungsi, melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Selanjutnya, melalui mekanisme *self assessment*, pada 13 September 2024, BPOM dengan penuh percaya diri melakukan submit untuk *the computerized global benchmarking tools* (cGBT) dan *performance evaluation* (PE) *indicator, summary of changes* dan data dukungannya ke *WHO share point*.

Pada 7 November 2024 WHO menggelar *virtual technical meeting* dengan BPOM untuk melakukan evaluasi terhadap cGBT yang telah disubmit BPOM. Selama setahun terakhir, BPOM telah melakukan penilaian mandiri

Proses Evaluasi Terhadap 9 Fungsi Utama

- 01 Sistem Regulasi (*Regulatory System*).
- 02 Registrasi dan Izin Edar (*Registration and Marketing Authorization*).
- 03 Farmakovigilans (*Vigilance*).
- 04 Surveilans dan Pengawasan Peredaran (*Market Surveillance and Control*).
- 05 Pemberian Izin (*Licensing Establishments*).
- 06 Inspeksi Regulasi (*Regulatory Inspection*).
- 07 Pengujian Laboratorium (*Laboratory Testing*).
- 08 Pengawasan Uji Klinik (*Clinical Trials Oversight*).
- 09 Pelulusan Bets Vaksin (*Lot Release*).

dengan menggunakan WHO GBT untuk sub-indikator tingkat *maturity level 4* dan indikator *performance evaluation* (PE) WLA di 9 fungsi regulasi. “Kami sepenuhnya siap untuk melanjutkan evaluasi dan berkomitmen untuk kerja sama dan transparansi di setiap tahap,” tegas Taruna.

Kemudian pada 20--23 Januari 2025, BPOM melakukan evaluasi lanjutan dengan WHO secara *virtual*. Evaluasi yang berlangsung selama 4 hari tersebut dihadiri oleh kesembilan fungsi dan didampingi oleh para pakar beserta tim terkait. Pada kesempatan

tersebut, BPOM memberikan respons terhadap *feedback* WHO atas hasil *self-assessment* cGBT dan indikator PE yang sebelumnya telah disampaikan pada pertemuan 7 November 2024. Pertemuan kali ini merupakan *virtual meeting* ke-2 yang dilakukan BPOM bersama WHO dalam rangka penilaian untuk meraih WLA.

Selanjutnya pada hari terakhir, WHO memberikan respons dan informasi tahapan selanjutnya yang harus ditempuh BPOM. Menutup pertemuan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,



Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan pernyataan optimisme pada WLA Assessment secara daring dari Kantor BPOM, Jakarta (07/11/2024).

dan Zat Adiktif, Rita Mahyona turut menyampaikan *closing remark* dengan mempertegas pernyataan Kepala BPOM pada pertemuan sebelumnya bahwa BPOM berkomitmen untuk melanjutkan tahapan evaluasi sesuai *roadmap* yang telah disepakati dengan WHO.

Pada saat *virtual meeting* pertama dengan WHO, asesor WHO memberikan apresiasi atas penyampaian BPOM yang dinilai sangat terstruktur, mudah diakses, transparan, dan disusun dengan sangat baik. Meskipun menerima pujian positif, WHO juga memberikan sejumlah umpan balik yang harus ditindaklanjuti. Klarifikasi awal telah disampaikan langsung oleh BPOM dalam pertemuan tersebut dan untuk jawaban tertulis, akan dikirimkan sesuai jadwal yang telah disepakati. Respon positif dari WHO ini tentunya menjadi semangat baru bagi BPOM untuk terus optimis dalam meraih WLA.

Sosialisasi kepada Stakeholder

Mundur ke belakang, pada 9-10 Juli 2024, BPOM menggelar rapat pleno bersama para pakar di bidang pengawasan obat yang bertujuan untuk mengkaji hasil *draft self-assessment* terhadap 9 fungsi yang dinilai dalam WLA bersama UPT seluruh Indonesia.

Kemudian pada 12 Juli 2024 BPOM juga melakukan sosialisasi WLA dengan mengundang seluruh lintas sektor terkait beserta Deputy of WHO Representative for Indonesia Momoe Takeuchi. Pada kesempatan tersebut, upaya BPOM menuai apresiasi dari Momoe Takeuchi. Ia mendukung BPOM untuk mencapai WLA, yang menjadi poin kritical dalam memperkuat sistem kesehatan, yaitu untuk mendukung tercapainya akses ketersediaan produk obat yang aman.

"Kami antusias dengan bergabung Indonesia [BPOM] dalam grup ini. Upaya

ini tidak hanya melibatkan BPOM, tapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan produk kesehatan di dalam negeri. Kami akan terus dukung usaha BPOM untuk bergabung dalam *framework* regulatori ini, untuk mencapai standar global tertinggi keamanan produk obat bagi negeri dan dunia global," tukas Momoe.

Melalui sosialisasi tersebut, terlihat komitmen dan upaya BPOM tidak hanya fokus pada kesiapan data dukung dan perangkat internal, tetapi juga turut menyiapkan lintas sektor lain untuk memastikan implementasi dan dampak dari sistem pengawasan yang diterapkan. Dukungan seluruh *stakeholder* dari kementerian/lembaga, industri farmasi, distribusi farmasi, dan pelayanan kefarmasian menjadi kunci keberhasilan.

BPOM optimis mampu memenuhi kriteria WLA dengan terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi terkini dalam sistem pengawasan. Namun untuk mewujudkan hal ini diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri farmasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan kebijakan yang konsisten dan investasi di sektor kesehatan menjadi faktor kunci untuk mencapai pengakuan WLA dan memaksimalkan dampaknya bagi Indonesia. ■



"The report is very well structured, easy to access, very transparent, very well done."
- Asesor WHO Anna Laura -



BPOM bersama WHO menggelar virtual meeting lanjutan membahas feedback WHO atas hasil self-assessment cGBT dan Performance Evaluation (PE) indikator sebelumnya, Jakarta (20/1/2025).



Virtual Technical meeting dengan WHO untuk evaluasi cGBT tools yang telah disubmit BPOM (07/11/2024).



Deputy of WHO Representative for Indonesia Momoe Takeuchi menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap BPOM untuk meraih WLA pada forum Sosialisasi BPOM menuju WLA kepada stakeholder, Jakarta (12/7/2024).

Perjalanan BPOM Raih WLA



Manfaat Pengakuan WLA bagi Indonesia

- 01 Rujukan Regulator Global**
BPOM diakui sebagai otoritas regulatori yang kredibel secara global. Hal ini memungkinkan BPOM menjadi rujukan bagi regulator di negara lain dan meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang farmasi, khususnya vaksin.
- 02 Peningkatan Daya Saing Industri Farmasi Nasional**
Produk farmasi Indonesia khususnya vaksin, akan lebih mudah diterima di pasar global. Kemudahan akses ke pasar global ini juga dapat memacu investasi asing dalam sektor farmasi di Indonesia.
- 03 Peluang Ekspor Lebih Besar**
Pengakuan ini membuka peluang ekspor vaksin ke berbagai negara, terutama ke negara-negara yang mensyaratkan produk farmasi berasal dari regulator dengan status WLA. Hal ini akan mendorong peningkatan devisa negara dan memperluas pasar bagi produk vaksin Indonesia.
- 04 Peningkatan Kepercayaan Internasional**
Kepercayaan dunia terhadap mutu dan keamanan produk vaksin Indonesia akan meningkat. Hal ini tidak hanya mendukung status prakualifikasi WHO bagi produk vaksin nasional tetapi juga membantu membangun reputasi Indonesia sebagai produsen vaksin berkualitas tinggi.
- 05 Penguatan Fungsi Regulasi Berkelanjutan**
Untuk memenuhi kriteria WLA, BPOM perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, termasuk dalam aspek regulasi, pengawasan, dan penerapan standar internasional. Hal ini akan memperkuat fungsi regulatori BPOM secara berkelanjutan serta menciptakan ekosistem farmasi yang lebih aman dan tepercaya di dalam negeri.
- 06 Dukungan Ketahanan Kesehatan Global**
Dengan status WLA, Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam memastikan ketersediaan vaksin yang aman dan bermutu di pasar internasional. Hal ini juga mendukung peran Indonesia dalam upaya global untuk menghadapi tantangan kesehatan, termasuk pandemi di masa depan.
- 07 Penguatan Diplomasi Kesehatan**
Pengakuan ini memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dalam forum internasional terkait kesehatan dan farmasi. Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam menyusun kebijakan global terkait dengan keamanan dan distribusi produk vaksin.



Penulis : Tri Handayani
 Editor : Fathan Nur Hamidi

REN 2024: Optimalisasi Kinerja Menuju Organisasi Kelas Dunia

Rapat Evaluasi Nasional (REN) merupakan agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi program kinerja. Tahun 2024, REN terasa berbeda karena bertepatan dengan berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) 2020--2024. Evaluasi dilakukan menyeluruh di akhir periode Renstra untuk mengetahui efektivitas pengawasan obat dan makanan. Tak hanya itu, hasil evaluasi juga menjadi acuan untuk perbaikan perencanaan tahun depan dan penyusunan Renstra BPOM 2025--2029.



Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran pada penyerahan penghargaan 3 UPT terbaik Lomba Penerapan Sistem Mutu GLP dan 3 pegawai terbaik Lomba Inovasi Teknologi Pengujian Obat dan Makanan, Surabaya (3/12/2024).

Evaluasi adalah suatu aktivitas sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang dapat digunakan guna mengambil keputusan terkait program atau proyek yang dievaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam perancangan pelaksanaannya serta hasilnya.

Tahun 2024 menjadi penanda penting bagi insan BPOM untuk mengevaluasi program kinerja yang telah bergulir. Pahalanya di tahun ini ada dua momentum yang akan menentukan wajah pengawasan obat dan makanan.

Pertama, hadirnya Kepala BPOM yang baru dengan filosofi kepemimpinan dan konsentrasi yang tentunya berbeda. Kedua, berakhirnya masa Renstra 2020--2024 dan dimulainya penyusunan Renstra 2025--2029. Kedua hal ini akan mempengaruhi arah pengawasan obat dan makanan ke depan.

Mengangkat tema "Optimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mewujudkan BPOM sebagai Organisasi Kelas Dunia Menuju Indonesia Emas 2045", REN berlangsung di Kota Pahlawan, Surabaya, 3--4 Desember 2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam sambutan pembukanya menyebut tema

REN BPOM ini sejalan dengan visi besar BPOM yaitu 'menjulung' dalam kanvas internasional, 'membumi' dalam kebijakan yang implementatif, dan 'mengakar' kuat dalam sanubari seluruh pegawai dan masyarakat.

Menurutnya tantangan pengawasan obat dan makanan di Indonesia semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Banyak tantangan yang dihadapi BPOM dengan adanya peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, batas perdagangan antar negara yang semakin menipis (*borderless*) mengakibatkan kemudahan masuknya produk obat dan makanan tanpa izin edar ke Indonesia,

serta kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal dan palsu dengan modus yang semakin kompleks.

BPOM harus berada pada tingkat global, selevel dengan Amerika, Eropa, Korea, dan Jepang. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini BPOM berupaya untuk memperoleh predikat WHO Listed Authority (WLA). Predikat ini tidak hanya bermanfaat bagi BPOM, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat global terhadap produk farmasi Indonesia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM berupaya melakukan pengawasan secara berkelanjutan guna menjamin produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat terbukti aman, berkhasiat, dan bermutu. Karena itu, perlu kolaborasi bersama lintas sektor terkait. "Sinergi ketiga pilar pengawasan obat dan

Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) serta partisipasi/keanggotaan pada beberapa organisasi internasional.

Selain itu, BPOM akan terus mengawal pengembangan obat termasuk produk biologi dalam mendukung kemandirian farmasi dan komunikasi publik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Poin selanjutnya terkait program pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bersinergi bersama kementerian/ lembaga terkait. Di samping itu, BPOM terus berinovasi untuk mewujudkan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang efektif, efisien, dan kolaboratif. Sementara itu, dalam rangka percepatan pelayanan publik, BPOM melakukan transformasi digital untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha dengan pemanfaatan

juga aktif membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, masyarakat, serta aparat penegak hukum, agar upaya pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih sinergis dan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil, guna membangun kepercayaan publik terhadap keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Karena itu seluruh unit kerja diharapkan meningkatkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Pada akhir masa Renstra tahun ini, BPOM bersiap menyongsong masa



Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan arahan pada REN 2024, Surabaya (3/12/2024).

makanan yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci tercapainya pengawasan yang efektif," ujarnya.

Evaluasi Akhir Periode Renstra

Evaluasi akhir periode Renstra disampaikan oleh satuan kerja tingkat Eselon I dan satuan kerja pusat-pusat di lingkungan BPOM. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian yaitu saat ini BPOM menuju kelas dunia melalui *assessment* WHO Listed Authority (WLA) dan *re-assessment* The Pharmaceutical

kecerdasan buatan (*artificial intelligence/ AI*). *Pilot project* penggunaan AI akan mulai diimplementasikan untuk registrasi pangan olahan.

Tak kalah penting, BPOM terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta penindakan obat dan makanan yang terbukti melanggar aturan baik di jalur legal maupun ilegal. Untuk memperkuat penegakan hukum, BPOM terus memperbaharui dan memperkuat regulasi yang ada, menjadikannya lebih responsif terhadap dinamika pasar dan kemajuan teknologi. Selain itu, BPOM

depan dengan arah kebijakan yang semakin lebih baik. Karena itu perumusan perencanaan kinerja tahun 2025--2029 yang terukur sangat penting sehingga dapat terlihat *outcome* dan *impact* kegiatan pengawasan obat dan makanan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif ini, BPOM berharap dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan memberi dampak signifikan dalam menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus menanggulangi peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Pengawasan di Daerah

Bersamaan dengan penyampaian hasil evaluasi akhir periode Renstra, kinerja pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah juga turut dibedah secara mendalam. Hasil evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai capaian kinerja yang telah dilaksanakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai area yang perlu diperbaiki agar pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih optimal dan terstruktur dengan baik.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut di antaranya adalah perlunya penetapan indikator kinerja yang lebih tepat dan terukur, yang dapat lebih mudah dikendalikan oleh setiap UPT sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Indikator yang sesuai akan memungkinkan BPOM di daerah untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dengan lebih akurat, serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Penetapan indikator yang tepat juga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai target yang akan dicapai dan tantangan yang masih harus dihadapi.

Selain itu untuk meningkatkan pembinaan terhadap pelaku UMKM di sektor pangan, perlu adanya pemanfaatan secara maksimal bagi tenaga fasilitator eksternal untuk melakukan pendampingan. Pendampingan ini harus lebih terintegrasi melalui pendekatan jemput bola, yaitu dengan langsung turun ke lapangan dan memberikan bimbingan serta edukasi kepada UMKM. Dengan cara ini, BPOM dapat memastikan UMKM yang telah dibina secara pasti mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan lebih aman dan berkualitas.

Selain aspek pengawasan dan pelaporan, kondisi sarana dan prasarana di beberapa UPT juga menjadi perhatian. Beberapa UPT masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, terutama terkait dengan luasan tanah dan bangunan yang tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pengawasan yang optimal. Selain itu, sejumlah fasilitas laboratorium di beberapa UPT memerlukan pemeliharaan dan perbaikan. Akibatnya pengujian harus dilakukan ke UPT lain yang mungkin memiliki fasilitas yang lebih lengkap, yang tentunya memengaruhi efisiensi dan kecepatan proses

Arahan 2025



pengawasan.

Hasil evaluasi tersebut perlu dicermati seksama untuk perbaikan berkelanjutan. Menghadapi tantangan ke depan, BPOM di pusat dan daerah diharapkan dapat lebih siap dalam menjalankan tugas pengawasan yang semakin kompleks dan dinamis. Upaya perbaikan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan akan meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi sangat penting untuk menjadi pijakan penyempurnaan perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya,

REN ini menghasilkan luaran (*output*) yang implementatif untuk perbaikan perencanaan tahun 2025 dan penyusunan Renstra BPOM 2025--2029.

Kedepan BPOM akan terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis dalam hal mengawal keamanan pangan yang beredar sebagai bagian program Makan Bergizi Gratis. Untuk menjawab tantangan yang ada, BPOM berupaya melakukan pengawasan secara konsisten untuk menjamin peredaran produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. BPOM akan terus memberikan dedikasi dan kontribusi terbaik dalam melindungi masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. ■



Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan penghargaan TOP 8 Inovasi BPOM Tahun 2024 melalui UMKM Juara kepada UPT BPOM, Surabaya (3/12/2024).

Upaya Pemerintah

MENURUNKAN *STUNTING* MENJADI 14%

Gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan *stunting* (ISPS) adalah aksi serentak pencegahan *stunting* melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, verifikasi, intervensi, dan edukasi bagi ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (balita), dan calon pengantin (catin)

Pihak yang terlibat dalam Program ISPS

DESA

PROVINSI

PUSAT

PUSKESMAS

KABUPATEN/
KOTA

POSYANDU



LAKUKAN 10 PASTI

1

Memastikan dilakukan pendataan seluruh catin, ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerja untuk menjadi sasaran.

2

Memastikan seluruh catin, ibu hamil, dan balita mendapatkan pendampingan, serta memastikan datang ke posyandu.

3

Memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh posyandu.

4

Memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar, serta penyuluhan untuk catin, ibu hamil, dan balita.

5

Memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar.

6

Memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi.

7

Memastikan catin, ibu hamil, dan balita mendapatkan edukasi pencegahan *stunting* di posyandu.

8

Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi (e-PPBGM) di hari yang sama.

9

Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak.

10

Memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak termasuk rujukan khusus ke fasilitas pelayanan kesehatan.

PERAN BPOM DALAM ISPS



Pemeriksaan cara produksi pangan olahan yang baik pada sarana produksi pangan fortifikasi (minyak goreng sawit, garam konsumsi, dan tepung terigu).



Pelatihan kader keamanan pangan desa dan bimbingan teknis komunitas desa pangan aman.



BPOM menjadi *person in charge* monitoring dan evaluasi ISPS ke posyandu dalam melaksanakan 10 Pasti di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

**YUK, KITA BERGERAK SERENTAK
CEGAH STUNTING**



Jangan Asal Gunakan Injeksi Estetik dan Etiket Biru Kosmetik



Penulis : Christy Cecilia
Editor : Fathan Nur Hamidi

Tuntutan gaya hidup modern dan promosi produk kecantikan yang membanjiri ruang publik membuat masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan. Apa lagi tren produk kecantikan terus berkembang di antaranya injeksi estetik dan etiket biru kosmetik. Peredarannya yang kian masif perlu diwaspadai. Pasalnya kedua jenis produk kecantikan ini tidak bisa dijual bebas. Penggunaannya harus melalui resep dokter, tidak bisa sembarangan.



Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama lintas sektor terkait memberikan keterangan pers Hasil Intensifikasi Pengawasan dan Penindakan Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di Kantor BPOM, Jakarta (30/12/2024).

“Penampilan itu menguntungkan, selalu hanya gadis cantik saja yang kan dipilih menjadi nomor satu,” penggalan lagu JKT 48 yang ditonton jutaan penggemarnya di kanal YouTube ini cukup mewakili betapa pentingnya menjaga kecantikan sekarang ini. Kesadaran estetik masyarakat Indonesia untuk menjaga penampilan yang semakin meningkat ditambah pengaruh tren kecantikan global membuat minat masyarakat terhadap penggunaan kosmetik khususnya produk perawatan kulit (*skincare*) terbelang tinggi.

Kebutuhan terhadap produk *skincare* yang terus meningkat terlihat jelas dari data jumlah notifikasi kosmetik yang tercatat di BPOM. Sepanjang 2024, BPOM menerbitkan 124.368 izin edar kosmetik dengan kategori terbanyak pembersih wajah (9.013), *eau de parfum* (7.479), *lip color* (7.310), perawatan badan dan/atau tangan (7.248) dan *skin lightener* (5.254). Hal ini mencerminkan masyarakat semakin peduli terhadap

kesehatan dan kecantikan kulit mereka.

Tren ini ditangkap oleh pelaku usaha kecantikan sebagai potensi yang besar untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Selain variasi produk *skincare* yang terus berkembang di pasaran, ada juga tren yang semakin meningkat terkait minat konsumen untuk merawat kecantikan dan kesehatan kulit melalui layanan yang ditawarkan di klinik-klinik kecantikan. Konsumen kini tidak hanya bergantung pada produk perawatan yang tersedia di toko, tetapi juga semakin banyak yang memilih untuk menjalani berbagai perawatan kulit yang lebih mendalam dan profesional.

Klinik-klinik kecantikan menawarkan berbagai layanan mulai dari pengelupasan kulit mati yang bertujuan untuk memperbaiki tekstur kulit, hingga peresepan produk kosmetik dan *skincare* yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap individu. Tak hanya itu, semakin maraknya permintaan juga

mencakup perawatan estetika yang lebih kompleks, seperti injeksi botoks, *filler*, atau prosedur lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki tampilan kulit dan wajah. Semua prosedur perawatan ini dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan terlatih yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kecantikan dan kesehatan kulit.

Pahami Jenis Produk Kecantikan

Banyak orang beranggapan bahwa semua produk kecantikan termasuk dalam kategori kosmetik. Namun pemahaman tersebut sebenarnya keliru. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, kosmetik diartikan secara lebih spesifik sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis (kulit), rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, serta gigi dan membran mukosa mulut.

Fungsi utama dari kosmetik adalah

untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi atau memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik. Oleh karena itu, kosmetik tidak mencakup produk-produk yang ditujukan untuk penggunaan internal tubuh atau yang memiliki klaim medis.

Menurut peraturan ini, kosmetik hanya ditujukan untuk penggunaan di bagian luar tubuh. Sedangkan berdasarkan tujuan pemakaiannya terbagi menjadi kosmetik perawatan kulit dan kosmetik riasan. Kosmetik perawatan kulit berfokus pada perawatan dan pemeliharaan kesehatan kulit, serta memperbaiki masalah kulit tertentu. Sementara itu kosmetik riasan digunakan untuk meningkatkan atau mengubah penampilan, seperti untuk riasan wajah dan penampilan estetika lainnya.

Dengan pemahaman yang tepat mengenai definisi dan kegunaan kosmetik ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga memungkinkan konsumen untuk lebih cermat dalam menilai klaim yang ada pada kemasan produk, serta memahami batasan penggunaan dan efek yang dijanjikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Konsumen tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mengutamakan keamanan produk yang digunakan.

Resep Etiket Biru

Skincare etiket biru merupakan istilah untuk perawatan kulit yang mengandung bahan obat keras dan dibuat sebagai produk racikan. Produk ini bersifat personal dan penggunaannya ditujukan untuk pasien yang telah berkonsultasi dengan dokter. Dengan kata lain, *skincare* etiket biru dapat diperoleh berdasarkan resep dan penggunaannya harus dengan pengawasan dokter. Dengan demikian, *skincare* etiket biru tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.



Hasil temuan *skincare* etiket biru pengawasan BPOM pada klinik kecantikan, Jakarta (3/4/2024).

Namun tingginya permintaan tidak dibarengi dengan kemampuan semua orang untuk mengakses perawatan kecantikan di klinik yang diawasi oleh tenaga medis profesional. Situasi ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan memperjualbelikan *skincare* 'etiket biru' secara massal. Terutama melalui platform *marketplace* yang mudah diakses oleh konsumen.

Produk *skincare* etiket biru ini sering kali dipasarkan dengan klaim yang menarik dan menjanjikan hasil instan, namun tanpa pengawasan medis yang memadai. Keberadaan produk-produk semacam ini tanpa disadari semakin meresahkan. Hasil pengawasan BPOM pada April 2024 di 21 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM diperoleh *skincare* etiket biru yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai keekonomian sebesar Rp170 juta.

Skincare etiket biru yang digunakan tanpa pengawasan dokter, dapat membahayakan kesehatan kulit konsumen karena takaran dosis obat dalam kosmetik tidak terukur dan tidak sesuai dengan kondisi kulit pengguna. Penggunaan *skincare* etiket biru yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan antara lain okronosis (pigmentasi kulit menjadi kebiruan atau kehitaman), telangiektasis (melebarnya pembuluh darah kulit wajah), *tinea incognito* (infeksi jamur pada kulit wajah), kulit kering, kemerahan, nyeri menyengat, hingga merusak kulit permanen.

Injeksi Kecantikan

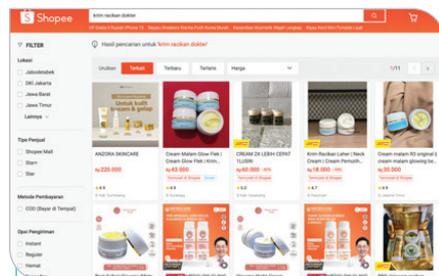
Selain *skincare* etiket biru, produk lain yang juga diminati adalah injeksi kecantikan. Produk ini diklaim dapat mencerahkan kulit, menghidrasi kulit, meremajakan kulit dengan hasil yang lebih cepat dibanding penggunaan kosmetik.

Injeksi kecantikan memang ditujukan untuk tujuan estetika, namun bahan yang disuntikkan ke dalam tubuh termasuk dalam kategori obat. Karena itu pemberiannya harus dilakukan oleh dokter. Pemberian injeksi kecantikan oleh tenaga nonmedis akan mengakibatkan permasalahan kesehatan lebih serius seperti sulit menelan dan berbicara, kelemahan leher, hingga wajah asimetri.

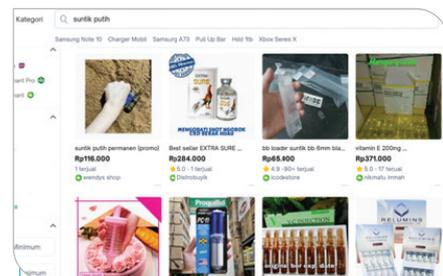
Serupa dengan etiket biru, produk injeksi kecantikan juga masih kerap disalahgunakan. Penyalahgunaan produk terjadi dengan ditemukannya penjualan injeksi kecantikan secara bebas di luar klinik berizin resmi. Fenomena ini mendorong penggunaan yang tidak tepat. Hasil pengawasan BPOM pada klinik kecantikan menunjukkan temuan produk injeksi kesehatan dengan nilai keekonomian sebesar Rp121 juta.

Merespons hal ini, BPOM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan *takedown link* penjualan *skincare* etiket biru dan injeksi kecantikan di *marketplace*. Upaya tersebut didukung dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan seputar *skincare* etiket biru melalui webinar, dan diseminasi terkait kosmetik melalui media sosial. Selain itu butuh kerja sama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan hanya di sarana yang resmi dan terdaftar.

Diharapkan melalui upaya ini akan timbul kesadaran masyarakat dalam memilih kosmetik aman dengan tidak mempercayai promosi kosmetik berlebihan. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan, terutama yang dijual bebas di *marketplace*. Tak kalah penting selalu pastikan produk tersebut terdaftar di BPOM serta diawasi oleh profesional medis agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak kesehatan kulit. ■



Penjualan *skincare* etiket biru di marketplace



Penjualan injeksi kecantikan di marketplace



Penulis : Salsabila Nadien
 Editor : Fathan Nur Hamidi

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PTM menyebabkan sekitar 43 juta kematian di dunia pada tahun 2021, setara dengan 75% dari kematian global yang tidak terkait pandemi. Untuk mengatasi faktor risiko PTM yang timbul dari pola makan tidak sehat, masyarakat perlu memerhatikan konsumsi pangan sehari-hari agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan. Informasi kandungan gizi pangan yang dikonsumsi dapat diketahui salah satunya melalui label gizi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pola makan tidak sehat, termasuk konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) menjadi satu penyebab PTM. Untuk mengendalikan PTM, WHO merekomendasikan beberapa kebijakan di antaranya melalui pelabelan gizi pangan yang merupakan kewenangan dan tugas BPOM. "Salah satu strategi pengendalian konsumsi GGL adalah melalui penetapan pencantuman informasi nilai gizi (ING), termasuk informasi kandungan GGL, pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji," ujar Taruna Ikrar.

Label gizi pada pangan olahan terkemas telah diatur oleh BPOM dan wajib dicantumkan pada label pangan dalam bentuk tabel Informasi Nilai Gizi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Tabel informasi nilai gizi menyajikan keterangan lengkap terkait kandungan gizi pangan olahan per sajian. Akan tetapi, tabel informasi nilai gizi kerap kali dicantumkan dengan ukuran yang terlalu kecil sehingga sulit terbaca oleh konsumen.

Sementara itu, konsumen memiliki kebutuhan untuk mengetahui kandungan gizi suatu produk dengan cepat dan tepat, sehingga dibutuhkan konsep pelabelan gizi yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh konsumen.

Nutri-Level: Format Baru Pelabelan Gizi pada Pangan Olahan

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke kini tengah mengalami peningkatan di masyarakat. Salah satu faktor risiko utama PTM adalah pola makan tidak sehat yakni asupan garam, gula, lemak trans, dan lemak jenuh yang berlebihan. Solusinya perlu kesadaran masyarakat dalam memilih pangan yang aman dan bergizi seimbang.



Konsep pelabelan gizi secara sederhana tersebut disebut dengan *front of pack nutrition labelling* (FOPNL) atau pelabelan gizi pada bagian depan label.

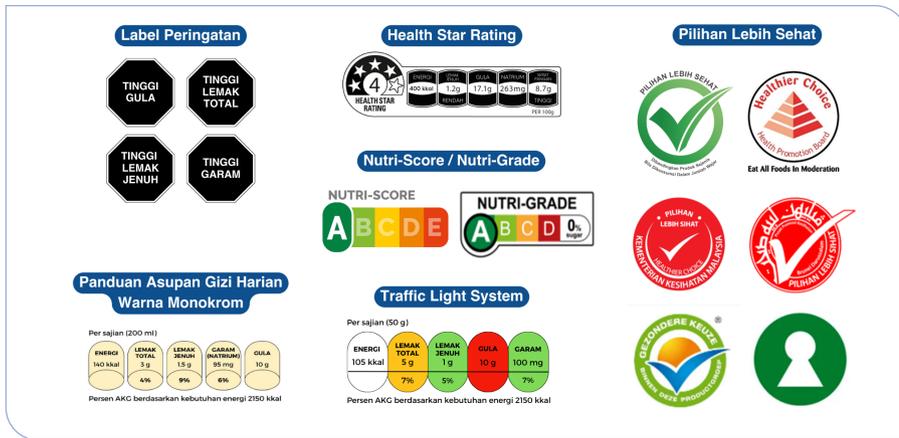
Penerapan Nutri-Level

Di berbagai negara di dunia, telah diimplementasikan berbagai jenis FOPNL yang dicantumkan pada bagian depan kemasan produk pangan, seperti format Label Peringatan, *Health Star Rating*, *Nutri Score*, *Traffic Light System*, atau Logo Pilihan Lebih Sehat. Penentuan format FOPNL tersebut disesuaikan dengan tujuan kesehatan pemerintah setempat dan karakteristik konsumen di setiap negara.

Di Indonesia, terdapat format FOPNL yang berlaku sejak tahun 2019, yaitu

Logo Pilihan Lebih Sehat dan Panduan Asupan Gizi Harian Warna Monokrom. Akan tetapi, implementasi dari dua jenis FOPNL tersebut masih rendah sehingga dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, BPOM melakukan peninjauan ulang mengenai kebijakan FOPNL di Indonesia untuk meningkatkan efektivitasnya dalam membantu konsumen memilih produk pangan olahan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berbagai penelitian di dunia menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih menyukai FOPNL yang menggunakan warna, simbol, dan teks interpretatif. FOPNL dengan kode warna untuk menunjukkan level kandungan gizi dinilai dapat mudah dipahami konsumen serta mempersingkat waktu melihat



FOPNL pada berbagai negara: Label Peringatan (Brazil, Meksiko, Uruguay); Panduan Asupan Gizi Harian Warna Monokrom (Indonesia); Health Star Rating (Australia dan Selandia Baru); Nutri-Score (Perancis, Belgia, Spanyol, Jerman); Nutri-Grade (Singapura); Traffic Light System (Inggris, Iran, Ekuador); Pilihan Lebih Sehat (Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Belanda, Denmark, Swedia)

label sebelum membeli produk. FOPNL tersebut juga dapat meningkatkan akurasi konsumen dalam mengidentifikasi produk yang lebih sehat.

Berdasarkan kajian ilmiah dan mempertimbangkan preferensi konsumen serta pelaku usaha di Indonesia, akan diperkenalkan FOPNL format baru, yaitu Nutri-Level. Nutri-Level merupakan format FOPNL yang menggunakan kode warna (hijau tua, hijau muda, kuning, dan merah) dan huruf (A, B, C, dan D) untuk mengklasifikasikan produk pangan berdasarkan tingkat kandungan GGL. Pangan olahan dengan kandungan GGL terendah akan mencantumkan logo Nutri-Level A (warna hijau tua). Sedangkan pangan olahan dengan kandungan GGL tertinggi akan mencantumkan logo Nutri-Level D (warna merah).

Nutri-Level tidak hanya akan dicantumkan pada label pangan olahan terkemas, tetapi akan dicantumkan pula pada kemasan pangan olahan siap saji yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini, BPOM tengah membahas ketentuan teknis mengenai pencantuman Nutri-Level pada pangan olahan terkemas.

Rencananya pencantuman Nutri-Level akan diimplementasikan secara bertahap berdasarkan jenis pangannya. Pada tahap awal, Nutri-Level akan menyasar produk minuman siap konsumsi, termasuk minuman berbentuk konsentrat cair dan serbuk yang perlu dilarutkan dengan air. Selanjutnya, ketentuan pencantuman Nutri-Level akan diperluas pada jenis pangan lainnya.

Manfaat Nutri-Level

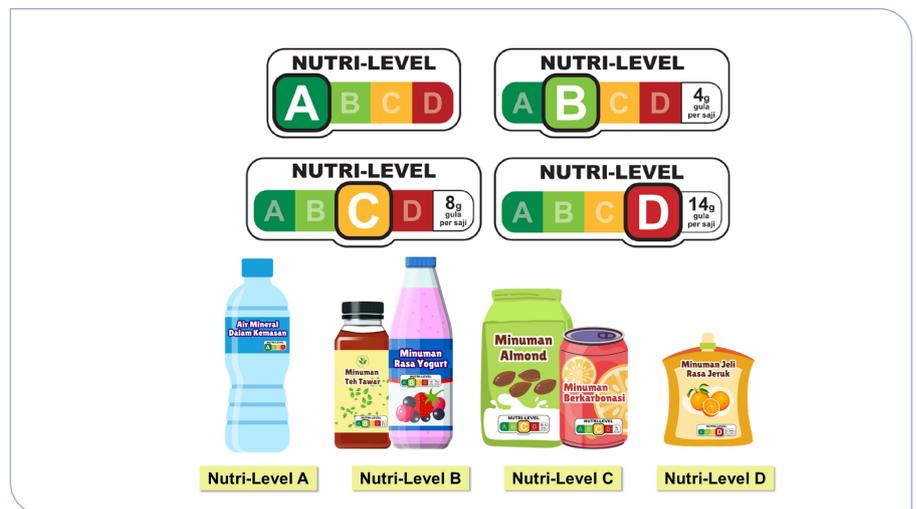
Pencantuman label Nutri-Level pada pangan olahan memiliki manfaat yang sangat besar dalam mendukung pola konsumsi dan hidup sehat di masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kandungan gizi pada produk pangan. Dengan adanya label ini, konsumen dapat dengan cepat menilai apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan gizi mereka, tanpa harus mempelajari informasi nilai gizi yang lebih kompleks. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki kebutuhan diet khusus, seperti mengurangi asupan gula, garam, atau lemak.

Nutri-Level juga dapat membantu mengurangi kebingungan konsumen

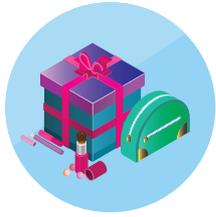
dalam menginterpretasikan informasi yang terdapat pada tabel informasi nilai gizi. Penggunaan label yang sederhana ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat, karena mendorong konsumen untuk cenderung memilih produk yang lebih sehat sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.

Selain itu, Nutri-Level mendorong produsen untuk lebih memerhatikan kandungan gizi dalam produknya, khususnya mengurangi kandungan GGL. Dengan adanya label ini, produsen akan terdorong untuk melakukan reformulasi atau mengembangkan produk baru yang lebih sehat sesuai kecukupan gizi yang disarankan. Hal ini akan menciptakan persaingan yang lebih sehat dan positif dalam industri pangan olahan, sehingga produsen terus berinovasi untuk menyediakan pilihan pangan yang lebih baik bagi konsumen.

Keberhasilan penerapan Nutri-Level tidak hanya bergantung pada produsen, tetapi juga pada peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan memberikan edukasi yang jelas, sementara masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang tertera pada label Nutri-Level. Sinergi ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban penyakit tidak menular akibat pola makan yang tidak sehat di masyarakat. ■



Ilustrasi pencantuman Nutri-Level pada produk pangan olahan



Penulis : Randi Dian Saputra
Editor : Fathan Nur Hamidi

Bisnis Kontrak Produksi Kosmetik Wajib Taat Regulasi

Kontrak produksi (*toll manufacture*) kosmetik menawarkan peluang besar bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi produk kecantikan tanpa harus mengelola fasilitas pabrik sendiri. Keuntungan model bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pemasaran dan pengembangan merek, sementara produsen kontrak menangani proses produksi dan pengemasan sesuai standar dan regulasi.



Antusiasme masyarakat untuk tampil menawan telah mendorong tingginya permintaan akan produk kosmetik, baik di pasar lokal maupun internasional. Fenomena ini dilihat sebagai peluang besar oleh para pelaku usaha kosmetik. Tak sedikit dari mereka yang mencoba peruntungan dengan memulai bisnis kosmetik. Dengan harapan bisa meraih keuntungan di pasar yang terus berkembang.

Namun membuka bisnis kosmetik tidak bisa sembarangan. Ada standar dan regulasi yang harus dipatuhi agar produk yang dihasilkan terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya. Faktanya pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan standar kualitas dan keamanan yang ketat. Hal ini dapat teratasi dengan pemilihan

mitra yang tepat dan pemahaman mendalam tentang regulasi menjadi kunci keberhasilan.

Salah satunya BPOM mewadahi Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024 sebagai titik awal bagi banyak pengusaha kosmetik untuk memahami dan memulai bisnis kontrak produksi kosmetik. Hajatan akbar BPOM untuk para insan kecantikan ini untuk memberikan ruang edukasi, pembinaan, dan fasilitasi kepada pengusaha dan calon pengusaha kosmetik. Terutama bagi mereka yang ingin mulai menjalankan bisnis kontrak produksi sesuai regulasi yang berlaku.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut expo ini tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga ruang berbagi pengetahuan dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara

pengusaha dan industri kosmetik. “Expo ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang kompetitif, aman, dan berkualitas,” ucap Taruna Ikrar.

Saat ini banyak pemilik merek kosmetik berlomba-lomba mendapatkan izin edar dengan menjalin kontrak produksi dengan industri kosmetik yang telah terbukti memenuhi standar dan memiliki rekam jejak pengawasan yang baik. Data BPOM menunjukkan saat ini jumlah badan usaha pemilik notifikasi (BUPN) kosmetik mencapai 1.904 pelaku usaha atau sekitar lebih dari 50% dari total pemilik izin edar kosmetik.

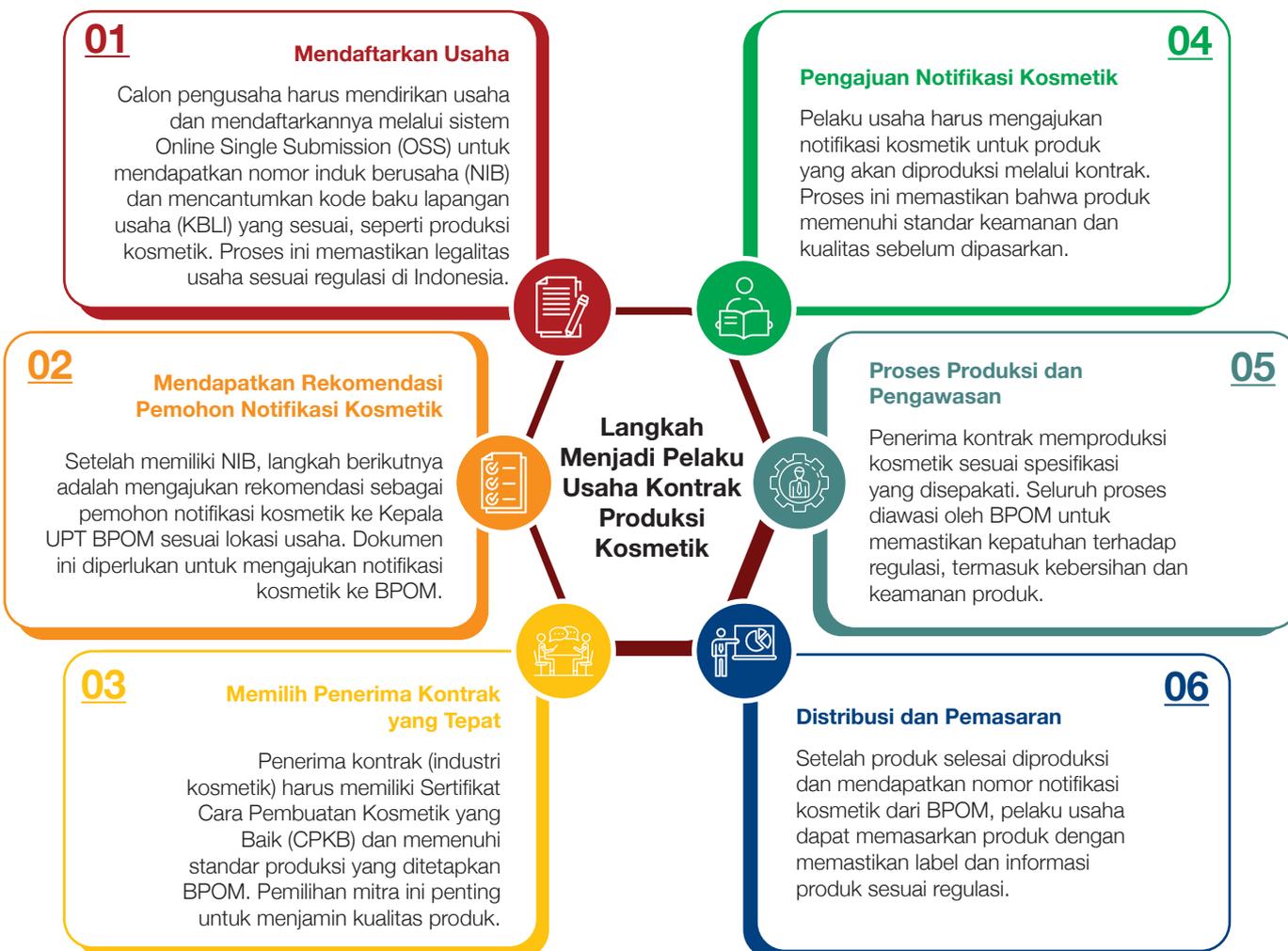
Dalam expo ini sebanyak 39 *exhibitor* dari industri kosmetik dalam negeri yang telah memenuhi syarat berpartisipasi, memberikan kesempatan untuk

berinteraksi langsung, menjalin kerja sama, dan mendapatkan wawasan tentang proses produksi kosmetik. Selain itu terdapat sesi *business matching* yang menjadi daya tarik utama dan mempertemukan calon pengusaha dengan mitra industri yang tepat, sehingga memudahkan mereka memulai bisnis kontrak produksi kosmetik.

Tak hanya itu, BPOM hadir dengan *one stop public services* untuk memberikan layanan konsultasi pengurusan izin edar kosmetik. Pelaku usaha dapat berkonsultasi bagaimana langkah-langkah memulai kontrak produksi kosmetik. Dengan langkah yang tepat, mereka dapat menciptakan produk-produk yang kompetitif dan menguntungkan. Pada akhirnya iklim usaha yang positif ini mampu mendorong pertumbuhan industri kosmetik dalam negeri terus melaju memiliki daya saing di pasar global. ■



Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama lintas sektor membuka Cosmetic Expo Toll Manufacturer 2024, Jakarta (13/9/2024).



BPOM Menyapa Maluku Jadikan Generasi Muda Konsumen Cerdas



Penulis : Muhammad Rizky
Editor : Fathan Nur Hamidi

Maluku sejak dahulu kala telah dikenal sebagai poros perdagangan rempah dunia. Keberagaman dan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah menjadikan Maluku sebagai wilayah yang sangat strategis dalam perdagangan global. Dengan potensi alam yang begitu besar, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan mumpuni untuk mengelola dan memaksimalkan kekayaan tersebut.



Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama dengan Pj Gubernur Maluku Sadali dan pelaku usaha obat dan makanan yang menerima Sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik dan Nomor Izin Edar pada #BPOMMenyapaMaluku, Sabtu (30/11/2024).

Kehadiran BPOM Menyapa Maluku menjadi catatan penting untuk mencerdaskan generasi muda. #BPOMMenyapaPelajar menyambangi SMAN 6 Ambon sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda. Kepala BPOM Taruna Ikrar berdialog mengedukasi pelajar untuk menjadi generasi sehat yang sadar obat dan makanan aman. Upaya ini merupakan salah satu penguatan pembangunan SDM di berbagai bidang termasuk kesehatan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Ini juga sejalan dengan misi BPOM yakni membangun SDM unggul di bidang obat dan makanan bersama seluruh komponen bangsa.

Taruna Ikrar berpesan kepada para pelajar untuk terus semangat belajar, karena mereka adalah keturunan raja-raja. "Maluku yang dapat diartikan dari turunan dari bahasa Arab, "Mulk" merupakan keturunan para raja-raja. Oleh karena itu, jangan minder, pantang menyerah dan tetap semangat untuk belajar," ujar Taruna Ikrar pada pembekalan kepada ratusan pelajar sekolah yang terletak lereng bukit Amahusu, Kec. Nusahiwe, Kota Ambon.

Untuk itu penting bagi siswa-siswi di Maluku menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Sehat itu sebagai syarat mutlak agar anak-anak Indonesia termasuk siswa-siswi di Maluku bisa tumbuh menjadi generasi hebat. Dengan menjaga asupan makanan yang masuk, baik dari gizi, keamanan, dan mutunya secara langsung telah membentengi tubuh kita dari berbagai penyakit. Begitu juga konsumsi obat, obat bahan alam (OBA), suplemen kesehatan, dan kosmetik juga jangan sembarangan.

Para pelajar dibekali dengan

Peran generasi muda sangatlah krusial dalam menentukan arah pembangunan, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Generasi muda adalah motor penggerak perubahan, pengembangan inovasi, dan pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kualitas SDM, khususnya pemuda, menjadi kunci utama dalam meraih kemajuan tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sekitar 24% penduduk Indonesia merupakan pemuda. Di Maluku, proporsi pemuda mencapai 28% dari total jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa generasi muda di Maluku dapat ambil bagian sangat

besar dalam mendorong pembangunan daerah dan nasional. Mereka adalah tenaga potensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

Karena itu, perlu adanya pemberdayaan generasi muda di Maluku. Dengan bekal literasi yang tepat, pemuda Maluku dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengelola SDA untuk mempercepat pembangunan di Maluku. Generasi muda Maluku diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, serta menjaga dan mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada untuk masa depan yang lebih baik.



Kepala BPOM Taruna Ikrar berdialog dengan pelajar SMAN 6 Ambon, Maluku (30/11/2024).



“Anak-anakku sekalian, sebelum mengonsumsi obat dan makanan, wajib untuk memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa ya,” pesan Taruna

pengetahuan umum seputar obat dan makanan yang aman dan tentunya cerdas memilih produk dengan senantiasa CEK KLIK.

Pemberdayaan masyarakat di Maluku harus terus bergulir mengingat indeks kesadaran masyarakat (IKM) Maluku masih di bawah indeks nasional. Data-data IKM terhadap obat dan makanan di Maluku yaitu sebesar 71,02 dengan kategori cukup baik. Angka ini masih di bawah indeks nasional (84,67) dan merupakan 3 provinsi dengan IKM terendah.

Sebagai penyemangat belajar, Kepala BPOM menceritakan pengalamannya ketika menuntut ilmu dan menggapai cita-citanya di luar negeri. “Saya juga berasal dari suatu daerah di Sulawesi Selatan, masa kecil saya banyak dihabiskan di kampung halaman, bermain dan belajar bersama dengan teman-teman, layaknya kalian. Saat itu, impian saya hanya satu, dapat menempuh pendidikan di negara yang ada saljunya,” seloroh Taruna diikuti sorak tepuk tangan antusias dari peserta. ■



Pelajar SMAN 6 Ambon membaca buku KataBPOM saat BPOMMenyapaPelajar, Maluku (30/11/2024).

Memang bisa,

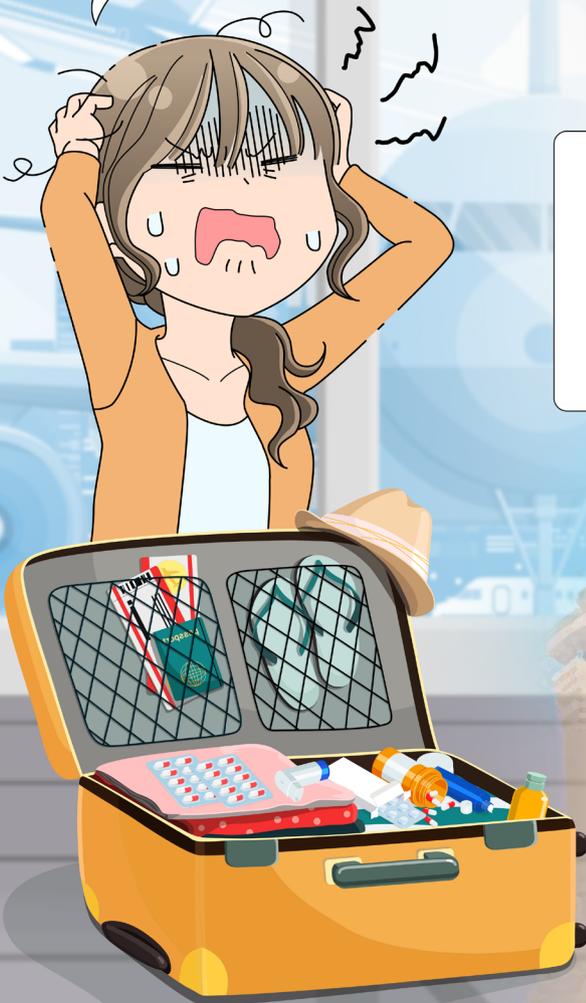
IMPOR OBAT PRIBADI? GIMANA CARANYA??

Aku lagi *confused* nih,
Gimana sih cara bawa obat-obatan
yang aku beli di Singapura
ke Indonesia?

Don't be confused lah..

Bisa kok bawa obat pribadi ke
Indonesia asal **tidak diperjual
belikan dan dalam jumlah
terbatas.**

Obat dari luar negeri yang dibawa
sebagai barang bawaan penumpang
boleh masuk ke Indonesia, dengan
ketentuan jika disertai **resep dokter,
jumlahnya dibatasi** untuk kebutuhan
maksimal 90 hari pengobatan.



Wah, ada batasannya juga, ya. Terus, ada lagi nggak syaratnya?

Ada! Kamu tinggal isi **Formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan untuk Keperluan Pribadi**, lalu serahkan ke petugas Bea Cukai.

Tanpa resep dokter juga bisa sih.. tapi dalam jumlah sangat terbatas, yaitu:



Sediaan padat maksimal 30 pcs/orang/item produk (contoh: 30 butir tablet atau 30 butir pil)

Sediaan semipadat, cair, dan aerosol maksimal 3 pcs/orang/item produk (contoh: 3 tube salep, 3 botol sirup, atau 3 turbuhaler).



Referensi:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

- 12 -

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE
DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR
KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN
Nomor: ST...

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir	:	
Alamat Kantor	:	
NPWP	:	
API/NIB	:	
Nama Eksportir	:	
Negara Asal Eksportir	:	

Untuk menerima:

No	Nama Produk	Kemasan	No. Izin Edar	Jumlah Barang	No. Lot/Bets	HS Code
	Produsen					
	Negara Produsen					

No. & Tanggal Invoice :
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...

Dengan ketentuan:

1. Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui laman resmi pelayanan SKI *Border* atau SKI *Post Border* Badan Pengawas Obat dan Makanan atau SINSW.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur
tttd.
(Nama lengkap)
NIP

Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau SINSW dan tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.

Pindai di sini





Kolaborasi Lintas Sektor dalam Satgas Fitofarmaka melalui Kegiatan Focus Group Discussion "Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Obat Bahan Alam menjadi Fitofarmaka" di Jakarta, Senin (27/5/2024)



Penulis : Lucky Argasetya
Editor : Hendriq Fauzan Kufanto

BPOM mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo yang berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk asli dalam negeri, khususnya fitofarmaka. Kepala BPOM bahkan menegaskan bahwa potensi fitofarmaka tidak hanya menjadi solusi lokal dan nasional, namun juga di pasar global. Ia menekankan fitofarmaka harus menjadi wujud konkret dari inovasi berbasis sumber daya alam Indonesia yang bernilai tinggi.

Kawal Percepatan Hilirisasi Penelitian Bahan Alam Menuju Fitofarmaka

Masyarakat Indonesia tentu telah mengenal obat tradisional. Potensi dan kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikan obat tradisional dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Tidak jarang obat tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat, di samping obat kimia. Obat tradisional, baik berupa racikan maupun produk yang beredar di pasaran digunakan untuk mengatasi keluhan bahkan penyakit.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan obat tradisional di sarana kesehatan sebesar 31,4%. Istilah obat tradisional kini telah berubah menjadi obat bahan alam sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Obat bahan alam dapat berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam.

Angka penggunaan obat bahan alam perlu ditingkatkan dengan mendorong pemanfaatan obat bahan alam (OBA),

terutama di layanan kesehatan. Kepercayaan masyarakat dan tenaga kesehatan bahwa OBA bersifat alamiah perlu ditunjang dengan bukti ilmiah sehingga terjamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Pembuktian ilmiah obat herbal terstandar melalui uji praklinik, sedangkan fitofarmaka melalui uji praklinik dan uji klinik.

Tingkat kepercayaan tenaga kesehatan terhadap produk OBA akan meningkat seiring dengan tingkat pembuktian ilmiah (*level of evidence*) produk OBA. Pengembangan OBA menjadi fitofarmaka tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat meningkatkan daya saing industri farmasi/industri OBA nasional.

Prioritas BPOM untuk mendukung kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan

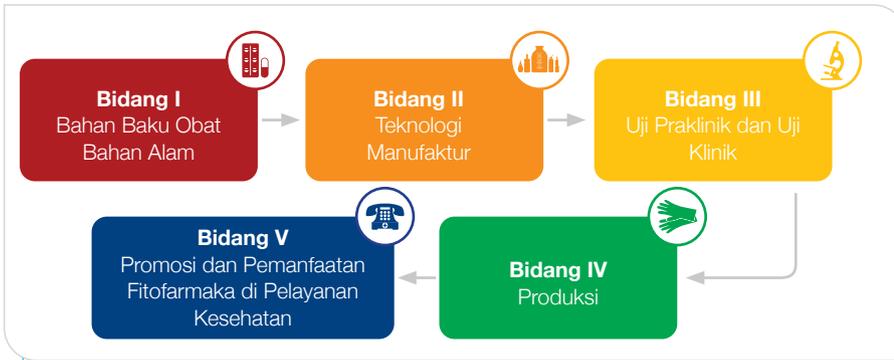
alat kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Hal ini sejalan dengan rencana aksi tindak lanjut pengembangan fitofarmaka. Pengembangan fitofarmaka ini menjadi suatu tantangan baik dari segi finansial maupun teknis khususnya terkait pelaksanaan uji klinik sebagai dasar pembuktian ilmiah.

Penguatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

BPOM secara kolaboratif mengawal percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka bersama kementerian/lembaga yang terlibat dalam konsorsium. Satgas Fitofarmaka yang telah dibentuk sejak Tahun 2019 direvitalisasi melalui Keputusan Menteri Bidang Koordinator PMK Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan



Pembahasan Revitalisasi Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka (Satgas Fitofarmaka) bersama Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (23/1/2024)



Bidang-bidang dalam Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

Pemanfaatan Fitofarmaka. Kepala BPOM bertindak sebagai Pengarah, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua, dan 4 unit teknis BPOM terlibat dalam bidang-bidang satuan tugas (Satgas).

Sesuai dengan tupoksi Satgas Fitofarmaka Bidang III Uji Praklinik dan Uji Klinik, BPOM mengawal penelitian OBA dalam percepatan hilirisasi fitofarmaka melalui pendampingan, baik sejak penyusunan protokol hingga pelaksanaan uji praklinik dan/atau uji klinik. Selain itu, BPOM juga terlibat dalam proses seleksi proposal pendanaan riset yang potensial dikembangkan menjadi fitofarmaka. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendampingan penelitian uji praklinik dan uji klinik berupa simplifikasi regulasi dengan mekanisme pendelegasian wewenang berupa (1) simplifikasi regulasi dengan mekanisme pendelegasian wewenang Persetujuan Pelaksanaan

Uji Pra Klinik (PPUPK) dan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK); (2) pengembangan aplikasi pengajuan PPUPK/PPUK; serta (3) peningkatan kompetensi dan pengetahuan peneliti dan pelaku usaha.

Data penelitian OBA sampai akhir November 2024 yang telah didampingi dan dievaluasi BPOM sebanyak 105 penelitian, yang terdiri dari 74 uji praklinik dan 31 uji klinik. Pelaksanaan uji klinik

yang baik dapat memberikan hasil yang valid dan kredibel. Hasil uji klinik yang terbukti keamanan dan kemanfaatannya dapat digunakan untuk registrasi produk fitofarmaka.

BPOM Inisiasi Kolaborasi

Pada 19 September 2024, BPOM menginisiasi kegiatan strategis bertajuk Business Matching Peneliti, Industri, dan Lembaga Riset Fitofarmaka. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti regulator, peneliti, pelaku usaha, dan site uji klinik. Acara bertujuan membangun kolaborasi yang kokoh antara pihak yang terlibat serta diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan inovasi dengan proses komersialisasi produk.

Selain itu, BPOM juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Obat Bahan Alam menjadi Fitofarmaka pada 27 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat upaya pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industri untuk bersama-sama meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka. Pentingnya forum interaktif ini yaitu untuk menjajaki potensi kolaborasi dan kerja sama dalam hilirisasi hasil penelitian menjadi produk komersial. Mulai dari produksi bahan baku yang berkualitas hingga pengembangan produk jadi yang siap bersaing di pasar.

Semua upaya BPOM ini, tidak hanya memperkuat ekosistem riset dan inovasi tetapi juga berkontribusi pada kemandirian farmasi nasional. Hilirisasi fitofarmaka yang berkelanjutan akan menjadi motor penggerak untuk menciptakan produk berbahan alam unggulan. Menjadikan Indonesia pemain utama dalam industri farmasi berbasis sumber daya alam. ■



Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan Komitmen dan Dukungan Penuh terhadap Pengembangan dan Hilirisasi Obat Bahan Alam, di Surabaya pada Kamis (19/9/2024)



Penulis : Putri Damai Lestari
Editor : Hendriq Fauzan Kusfanto

Masa Depan Registrasi Pangan Olahan: AI sebagai Solusi Efisiensi Registrasi

Artificial intelligence (AI) menjadi populer hari-hari ini karena tidak hanya menguntungkan dari sisi otomatisasi, namun juga dapat mengefisienkan sumber daya dan mengefektifkan hasil secara cepat. Dalam konteks registrasi pangan olahan, bagaimana AI dapat dimanfaatkan?

Direktorat yang bertanggung jawab terhadap registrasi pangan olahan di BPOM adalah Direktorat Registrasi Pangan Olahan (RPO). Setiap tahunnya Direktorat RPO menghadapi tantangan yang semakin meningkat, baik dari sisi jumlah permohonan maupun pengetahuan pelaku usaha. Selama 2019–2023, sebanyak 337.852 produk pangan olahan telah terdaftar di BPOM. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun, dengan mayoritas pendaftar berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencapai 91,3% dari total pelaku usaha. Namun, data BPS tahun 2021 mengungkapkan hanya 0,5% dari pelaku usaha pangan yang mendaftarkan izin edar produknya.

Sejak 2022, Direktorat RPO telah mengimplementasikan e-registration berbasis risiko (e-reg RBA). Proses registrasi ini terbagi ke dalam tiga kategori risiko, yaitu tingkat risiko menengah

rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Pada proses registrasi tingkat risiko menengah rendah, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan komitmen yang tercantum dalam perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) paling lambat 12 bulan sejak PB-UMKU diterbitkan. Sebanyak 27,48% sertifikat pemenuhan komitmen dibatalkan karena produk yang didaftarkan tidak memenuhi ketentuan. Sebesar 67% pemenuhan komitmen yang dibatalkan berasal dari usaha mikro dan kecil (UMK). Penyebab pembatalan ini antara lain adanya kesalahan pemilihan jenis kemasan, kategori pangan, penggunaan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang memiliki batas maksimal, serta kelalaian dalam pengunggahan dokumen.

Salah satu masalah eksternal Direktorat RPO yaitu rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum di

kalangan pelaku usaha, terutama pelaku UMK. Sementara itu di sisi internal, Direktorat RPO menghadapi kendala jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Ketidakseimbangan antara jumlah permohonan yang masuk dengan jumlah evaluator yang tersedia mempengaruhi durasi proses registrasi.

Menjawab tantangan ini, BPOM akan menerapkan teknologi kecerdasan artifisial pada sistem e-reg RBA. Dengan penerapan teknologi AI, maka sistem dapat secara otomatis memeriksa kelengkapan dokumen, keabsahan data, dan kesesuaian informasi yang diunggah oleh pelaku usaha. Hal ini akan mengurangi beban kerja evaluator serta meningkatkan akurasi dan kecepatan proses registrasi. AI pada e-reg RBA juga dapat membantu mendeteksi potensi manipulasi data, sehingga produk yang tidak memenuhi standar dapat dicegah untuk beredar.

Penerapan AI Pertama di BPOM

Rencana penerapan AI pada sistem e-reg RBA merupakan yang pertama di BPOM. Direktorat RPO bekerja sama dengan Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR EMK BRIN) telah melakukan kajian kesiapan BPOM dalam menggunakan AI untuk optimalisasi registrasi pangan olahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indeks Kesiapan AI BPOM adalah 2,41 (skala 4), yang berarti bahwa BPOM berpotensi untuk melakukan adopsi AI. Hal ini juga menunjukkan bahwa BPOM memiliki orientasi dan visi transformasi sistem berbasis AI yang didukung kekuatan data, SDM dan budaya, serta implementasi privasi data dan ketersediaan *cyber security*. Namun di balik hal tersebut, hasil kajian juga menyimpulkan BPOM masih perlu penguatan ekstra di bagian pengetahuan infrastruktur dan teknologi inovasi serta protokol AI.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa upaya BPOM dalam mengadopsi AI akan mengakselerasi transformasi digital BPOM dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Cahyono menilai BPOM

memiliki modal yang kuat, khususnya dengan indeks SPBE 4,08 dengan predikat "Sangat Baik", dan komitmen pelayanan yang tinggi sehingga sangat memungkinkan BPOM untuk mengadopsi AI.

Langkah selanjutnya dalam proses implementasi teknologi AI pada e-reg RBA adalah penyusunan desain e-reg RBA dan peta jalan pengembangan e-reg RBA berbasis AI. Rancangan desain e-reg RBA berbasis AI ini juga telah divalidasi oleh *technology company* untuk memastikan teknologi yang akan digunakan tersedia di pasaran serta dapat diaplikasikan ke sistem e-reg RBA.

Peta Jalan

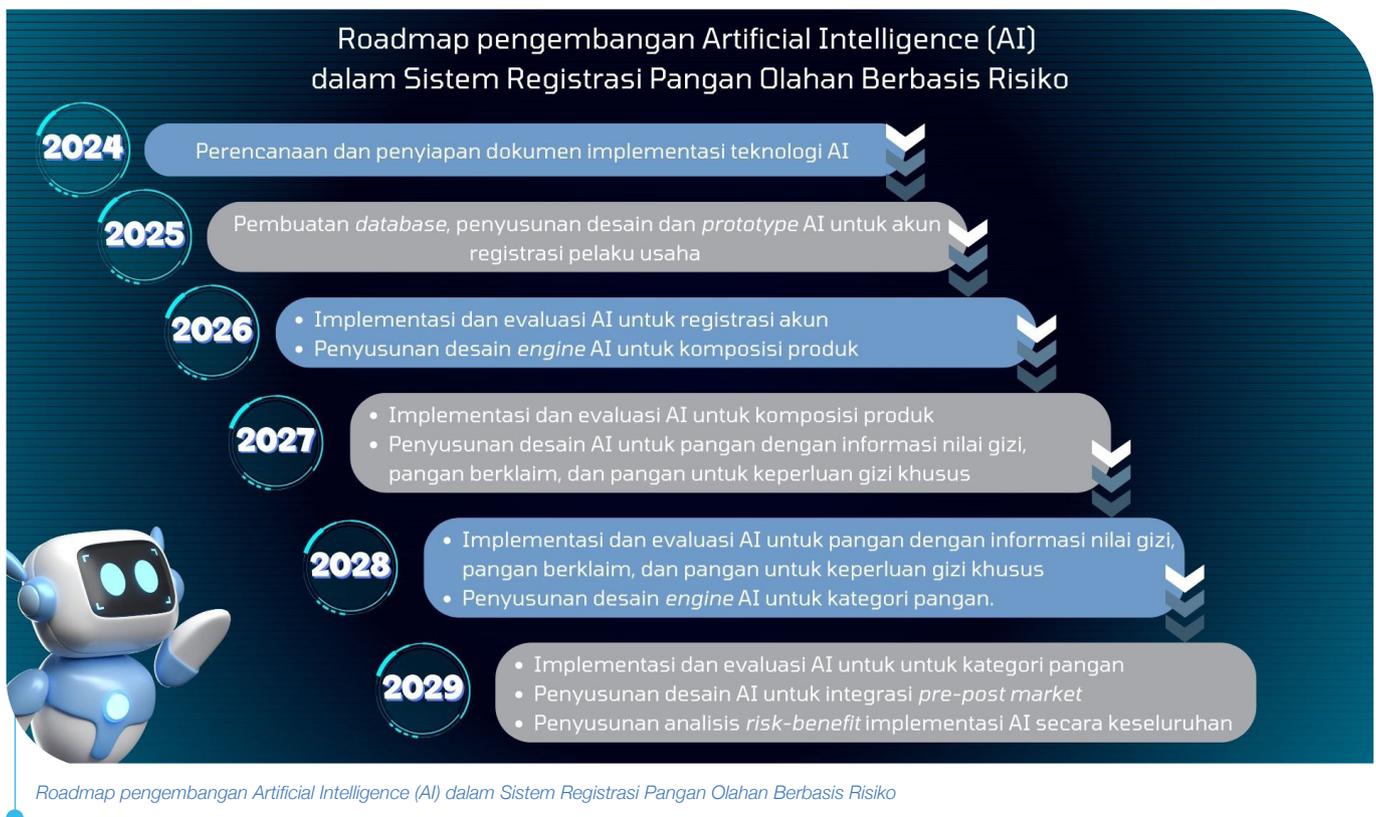
Terdapat lima tahapan proses implementasi teknologi AI pada e-reg RBA. Tahun 2024 merupakan tahapan awal perencanaan dan penyiapan dokumen implementasi teknologi AI Generasi 1 yang memberikan kemudahan pelaku usaha dalam proses registrasi akun perusahaan. Pada Generasi 1 ini akan mengurangi jumlah formulir yang harus diisi, dari yang semula terdapat 37 formulir menjadi hanya 11 formulir saja. Waktu evaluasi juga menjadi lebih singkat, dari 10 hari kerja menjadi 1 hari kerja. Sistem AI ini akan memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi berbagai tugas, termasuk fitur *autofill form*

berdasarkan dokumen yang diunggah, penyaringan dokumen yang relevan, serta pencocokan konten dokumen untuk memastikan kesesuaian data yang diperlukan.

Pada tahap awal, sistem AI akan dilatih untuk dapat membaca berbagai dokumen persyaratan registrasi akun. Selain itu, akan dilakukan pula sinkronisasi data ke aplikasi BPOM yang menerbitkan sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).

Pada tahapan pengembangan selanjutnya akan dilakukan implementasi AI pada registrasi produk. Pengembangan pada sistem registrasi produk dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesulitan *database* yang harus disiapkan dan algoritma evaluasi yang akan dilakukan oleh sistem.

Pada pengembangan akhir, sistem akan dikoneksikan dengan berbagai pihak terkait seperti laboratorium untuk dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Interkoneksi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya yang tidak perlu dari pelaku usaha sehingga meminimalisasi kesalahan pemilihan parameter uji, serta pemastian keabsahan dokumen hasil pengujian. ■





Penulis : Rizan Febriana Pratama
Editor : Hendriq Fauzan Kusfanto



Tanaman *Sorghum bicolor* (sorgum) yang tumbuh subur di ladang. Sorgum dikenal sebagai sumber pangan alternatif yang tahan kekeringan dan memiliki potensi besar untuk ketahanan pangan global.

Sorgum: Potensi Bahan Pangan Lokal Bernilai Ekonomi Tinggi untuk Ketahanan Pangan

Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menciptakan inovasi produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan nasional tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bangsa. Kekayaan budaya dan tradisi Indonesia turut tercermin dalam ragam pangan olahan khas daerah yang beragam dan unik. Melimpahnya bahan pangan Indonesia seperti sorgum dapat menjadi pengganti gandum dan beras sebagai solusi ketahanan pangan berbasis lokal.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor gandum, yang pernah mencapai angka 11 juta ton per tahun, pemerintah mendorong hilirisasi sorgum sebagai salah satu solusi strategis. Sebagai tanaman sereal yang kaya manfaat dan mudah dibudidayakan, sorgum memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang efektif dalam menekan kebutuhan gandum impor. Menyadari potensi ini, pemerintah mengambil langkah besar dengan menyusun *roadmap* nasional untuk produksi dan hilirisasi sorgum.

Target pengembangan lahan mencapai 115.000 hektare pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 154.000 hektare pada tahun 2024. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memaksimalkan potensi sorgum sebagai bahan pangan strategis. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan menjadikan sorgum sebagai bahan pangan lokal yang bernilai tinggi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Sorgum (*Sorghum bicolor*) adalah salah satu tanaman pangan yang berasal dari keluarga rumput (*Poaceae*), yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan alternatif. Sorgum memiliki kandungan zat besi (5,4 mg/100 g) yang lebih tinggi dibandingkan dengan gandum (3,5 mg/100 g) dan beras pecah kulit (1,8 mg/100 g). Protein yang dikandungnya pun signifikan (10–11%) serta bersifat bebas gluten, cocok untuk penderita alergi gluten. Selain itu, serat tinggi dan indeks glikemik rendah dari sorgum berpotensi mengurangi risiko diabetes melitus dan obesitas.

Sorgum dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan yang populer seperti tepung sorgum, nasi sorgum, sirup sorgum, sereal, hingga roti dan kue berbahan dasar tepung sorgum. Tepung sorgum, yang bebas gluten dan cocok untuk individu dengan sensitivitas terhadap gluten, semakin diminati sebagai alternatif tepung gandum, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah

tanpa maupun industri makanan. Diversifikasi produk berbasis sorgum ini dapat memperkaya pilihan konsumsi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan pangan konvensional seperti gandum dan beras.

Majukan Pangan Olahan Sorgum

BPOM berperan aktif mengawal produksi dan distribusi sorgum dari sisi hulu hingga hilir. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, BPOM terus melakukan pembinaan terhadap produsen pangan. Pembinaan ini, khususnya di sisi *supply*, bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) pangan olahan berbasis sumber daya lokal seperti sorgum.

Salah satu fokus utama adalah penerapan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), yang diharapkan dapat menjamin terpenuhinya

kebutuhan pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Langkah strategis lainnya adalah penguatan kapasitas UMK pangan yang memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. UMK tidak hanya membantu menggerakkan perekonomian rakyat tetapi juga memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

BPOM menginisiasi sarasehan untuk memadukan pengembangan dari hulu ke hilir diversifikasi sorgum sehingga sorgum tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan segar namun juga dikonsumsi sebagai pangan olahan. Salah satu tujuan sarasehan ini adalah untuk membangun konvergensi program antar kementerian, dinas, serta pihak swasta

Kamis (2/11/2023), Kepala BPOM membuka secara langsung kegiatan Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum yang diadakan di Mojokerto. Sarasehan ini menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari beragam bidang, termasuk perwakilan BPOM, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, serta PT Dirgantara Indonesia.

Sinergi ini bertujuan memastikan jaminan mutu, keamanan, dan gizi produk berbahan sorgum. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, rangkaian sarasehan juga mencakup penandatanganan kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan. Kesepakatan ini bertujuan mendukung pengembangan sorgum sebagai pangan alternatif yang berkualitas, aman, dan bernilai gizi tinggi.

BPOM menginisiasi pelatihan teknis seperti penyuluhan keamanan pangan (PKP) untuk UMK. Pelaku usaha dibimbing untuk menerapkan CPPOB, mempelajari teknologi pengolahan pangan, serta memahami regulasi terkait pelabelan dan keamanan pangan. BPOM memfasilitasi pembuatan standar produk berbasis sorgum, termasuk regulasi kemasan dan label pangan olahan. Program *coaching* e-sertifikasi dan e-registrasi mendukung UMK untuk memperoleh izin edar, menjamin produk mereka memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pada 2024, kegiatan Pelatihan PKP dilaksanakan di berbagai tempat, beberapa di antaranya di Bandung dan Kabupaten Sumba Timur. Pada kegiatan tersebut telah terbit sebanyak 16 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan 56 UMK yang dibina.



Salah satu contoh Buku Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan Seri Olahan Sorgum yang disusun oleh BPOM dan Universitas Pasundan

Selain kegiatan luring, BPOM juga mengadakan kegiatan secara daring berupa webinar UMK Camp Seri 5 dengan tema “Sorgum sebagai Pangan Olahan Bernilai Ekonomi Tinggi”, Selasa (17/09/2024). Webinar ini direspon antusias oleh para pelaku UMK karena menghadirkan narasumber yang terdiri dari pakar/ahli serta pelaku UMK sorgum yang berbagi pengalaman dan wawasan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, BPOM bekerja sama dengan Universitas Pasundan menyusun 20 Buku Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan Seri Olahan Sorgum Tahun 2024. Buku ini bertujuan membantu UMK pangan olahan memanfaatkan bahan pangan

lokal dengan standar yang baik sehingga mampu bersaing di pasar global.

Dukungan BPOM dalam pengembangan sorgum mencerminkan komitmen tinggi untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal. Dengan dukungan yang berkelanjutan, sorgum berpotensi menjadi pilar utama dalam diversifikasi pangan di Indonesia. Pengembangannya sebagai bahan baku pangan lokal yang aman dan bermutu dapat mendorong percepatan penganekaragaman produk pangan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan nasional tetapi juga mendukung pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045. ■



Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Ema Setyawati (tengah) dan Ketua Tim Pemberdayaan UMK Pangan Olahan Anita Nur Aini (kiri) bersama Peserta Terbaik Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan UMK Pangan Olahan Berbasis Sorgum di Bandung, Sabtu (30/4/2024)



Penulis : Mulia Sondari dan Erika Juliani
 Editor : Hendriq Fauzan Kusfanto

Indonesia-Africa Forum (IAF) II telah diselenggarakan di Bali pada 1--3 September 2024. Forum ini menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam memperluas jejaring dan membangun sinergi dengan negara-negara di Afrika. Bagaimana BPOM berkontribusi dalam forum internasional ini?

BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia memiliki peran penting, di antaranya dalam melindungi kesehatan masyarakat, mendukung perkuatan ekonomi nasional, serta meningkatkan pemenuhan standar mutu dan ketentuan yang berlaku secara internasional. Berlandaskan dari tugas mulia tersebut, BPOM berpartisipasi aktif dan terlibat penuh membangun kemitraan dalam IAF II ini.

Dalam perhelatan IAF, BPOM menandai pencapaian strategis melalui serangkaian pertemuan bilateral dan penandatanganan kesepakatan yang menjadi jembatan masuknya produk farmasi Indonesia ke pasar Afrika. Pencapaian ini menjadi bukti nyata pentingnya diplomasi dalam peningkatan akses pasar. Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum ini menjadi tonggak kemajuan bagi industri farmasi Indonesia khususnya dalam mempermudah proses registrasi dan perizinan produk.

Selain itu, kolaborasi yang terjalin melalui IAF tidak hanya berfokus pada harmonisasi regulasi, namun juga membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Hal ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan kapasitas bersama yang akan mendorong pertumbuhan dan kemajuan di sektor kesehatan dan memperkuat

Peran Penting BPOM di Indonesia Africa Forum (IAF) 2024: Tingkatkan Akses Pasar dan Diplomasi Strategis



Kepala BPOM menandatangani MoU dengan Direktur Jenderal TMDA Tanzania, disaksikan oleh Wakil Presiden Tanzania, di Bali (3/9/2024).

posisi industri farmasi Indonesia di kancah global.

Tanzania: Menjalin Sinergi, Tingkatkan Kompetensi

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA) pada perhelatan IAF, menjadi langkah maju dalam upaya memperkuat kerja sama regulatori kedua negara. Langkah strategis ini bukan sekadar simbolis, melainkan bukti nyata komitmen untuk membangun fondasi kerja sama yang kuat dalam pengawasan obat.

Salah satu terobosan penting dalam kerja sama ini adalah dibukanya jalur

cepat untuk proses registrasi dan perizinan produk farmasi Indonesia di Tanzania melalui mekanisme *regulatory reliance*. TMDA akan mengakui hasil penilaian dan keputusan yang dikeluarkan oleh BPOM, sehingga dapat mempercepat masuknya produk farmasi Indonesia ke pasar Tanzania. Mekanisme ini membawa dampak positif bagi industri farmasi Indonesia dalam efisiensi waktu dan penjaminan standar keamanan dan mutu produk.

Di sisi lain, BPOM berkomitmen untuk mendukung TMDA dalam penguatan kapasitas regulatori melalui program peningkatan kapasitas. Wujud konkret komitmen ini telah dimulai melalui program *study visit* oleh dua inspektur



Pertemuan Bilateral antara Kepala BPOM dan Menteri Kesehatan Sudan, di Bali (3/9/2024).



Delegasi BPOM dan mitra dari Mozambik menghadiri Kick Off Task Force Indonesia-Mozambique, di Bali (3/9/2024)

TMDA ke BPOM pada 7–19 Desember 2023.

Sudan: Dari Kepedulian Menuju Kemitraan

Di tengah kompleksitas situasi yang dihadapi oleh Sudan, BPOM melaksanakan pertemuan bilateral dengan Kementerian Kesehatan Sudan dan *National Medicine & Poisons Drug* (NMPD) Sudan. BPOM menunjukkan komitmen kuatnya untuk membantu Sudan dalam menghadapi krisis akibat perang saudara, terutama melalui kerja sama kesehatan. Kerja sama ini menjadi bukti nyata solidaritas Indonesia dalam mendukung penanganan krisis kesehatan di Sudan.

Keberhasilan BPOM meraih *maturity level* 3 dan 4 mendapatkan apresiasi dari NMPD Sudan, yang ditunjukkan melalui kepercayaan mereka terhadap kualitas obat dan vaksin Indonesia. Pengakuan ini berbuah kesepakatan yaitu Sudan akan memberikan *recognition* terhadap produk farmasi yang telah terdaftar di BPOM. Langkah strategis ini menciptakan jalur perizinan yang lebih cepat dan efisien, dengan produk farmasi Indonesia yang telah mendapat persetujuan BPOM akan secara otomatis diterima di Sudan, membuka peluang besar bagi industri farmasi Indonesia.

Indonesia dan Sudan sepakat untuk memperluas ruang lingkup kerja sama di bidang regulasi obat, produk biologi, obat

herbal, dan kosmetik, termasuk dalam pertukaran informasi, *joint inspections*, *post marketing surveillance* dan *pharmacovigilance*, serta peningkatan kapasitas otoritas regulator. Dengan adanya program peningkatan kompetensi regulator, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang lebih maju dan berkelanjutan.

Mozambik: Kolaborasi untuk Penguatan Sistem Regulatori

BPOM memanfaatkan pertemuan dengan *Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento* (ANARME) Mozambik untuk membahas implementasi MoU yang telah ditandatangani saat kunjungan bersejarah Presiden RI ke Maputo pada Agustus 2023.

Pertemuan bilateral menghasilkan kesepakatan konkret dengan disusunnya *Plan of Action* (PoA) yang komprehensif. PoA ini akan menjadi panduan dalam transfer pengetahuan dan teknologi dari BPOM ke ANARME Mozambik, mencakup aspek-aspek krusial dalam regulasi farmasi. Fokus kerja sama meliputi berbagai bidang strategis, mulai dari regulasi bioavailabilitas/ bioekuivalensi (BA/BE), pengembangan kapasitas laboratorium yang mencakup pengujian dan desain pembangunan fasilitas, penguatan *law enforcement*, hingga *implementasi good manufacturing practice* (GMP). Kesepakatan ini menegaskan peran BPOM sebagai mitra strategis dalam penguatan sistem regulatori di kawasan Afrika.

Dampak Nyata Diplomasi BPOM

Keberhasilan IAF II 2024 memperlihatkan bahwa diplomasi kesehatan dapat menjadi instrumen kunci dalam membangun hubungan internasional yang bermakna. BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui kerja sama strategis dengan Tanzania, Sudan, dan Mozambik. Tidak sekadar membuka peluang ekonomi bagi industri farmasi nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem kesehatan di Afrika. Melalui transfer pengetahuan, harmonisasi regulasi, dan berbagai kesepakatan bilateral, Indonesia membuktikan diri sebagai mitra yang peduli dan berkualitas, membuka jalan bagi pertumbuhan bersama, serta memperkuat posisi industri farmasi Indonesia di pentas global. ■



Penulis : Anggita Tyaswuri
Editor : Hendriq Fauzan Kusfanto

ATMP adalah produk medis yang mengandung bahan aktif yang berasal dari sel atau jaringan yang dapat digunakan untuk pengobatan, pencegahan, atau diagnosis penyakit. ATMP dapat diklasifikasikan menjadi terapi gen, terapi sel, dan produk rekayasa jaringan. Saat ini, ATMP menjadi salah satu produk inovasi dalam bidang kesehatan yang sedang berkembang pesat menggantikan pengobatan kimia.

Bergesernya pengobatan kimia ke ATMP terjadi karena pengobatan kimia tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit yang sudah sampai pada tahap terminal. Tahap terminal adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penyakit/sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Pada beberapa penyakit, obat kimia hanya mampu meredakan gejala tanpa mengatasi akar penyebabnya. Akibatnya, pasien sering kali bergantung pada obat tersebut seumur hidupnya. Sebaliknya,

Advanced Therapy Medicinal Products: Harapan Baru Pengobatan Berbasis Sel, Genetik, dan Jaringan

Harapan baru dalam penyembuhan penyakit muncul dengan berkembangnya terapi canggih atau yang biasa disebut dengan *advanced therapy medicinal products* (ATMP). ATMP menjadi secercah cahaya untuk mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan kimia.

ATMP menawarkan pendekatan yang lebih personal dan menasar penyebab utama penyakit, sehingga memberikan harapan kesembuhan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pangsa pasar ATMP terus berkembang karena produk ini menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki obat konvensional. ATMP memberikan pengobatan yang lebih presisi, dengan efek samping yang minimal dan proses produksi yang

dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan setiap pasien.

Sebagai lembaga pengawas obat di Indonesia, BPOM berperan penting dalam mendukung kemandirian obat dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat lebih mudah mengakses obat yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Dalam mendukung pengembangan terapi canggih ini, BPOM telah menetapkan regulasi khusus untuk pembuatan produk

ATMP. Standar ini tertuang dalam Aneks 2 Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel dan Jaringan Manusia.

Berkat regulasi ini, sejumlah fasilitas di Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik untuk produk terapi berbasis sel. Di antaranya Bifarma Adiluhung, Prodia Stemcell, Instalasi Kedokteran Sel Punca Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), dan Daewoong Biologics Indonesia.

Tingkatkan Kapasitas Pengawas ATMP

Mengingat terapi ini masih tergolong baru di Indonesia, BPOM juga membekali para personelnya dengan pelatihan khusus terkait ATMP. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan pengawasan produk ATMP. Kegiatan yang diselenggarakan BPOM ini bertajuk *Empowering Regulatory Excellence: Workshop on Advanced Therapy Medicinal Products (ELEVATE)* di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk memastikan kualitas pelatihan, BPOM mengundang berbagai narasumber ahli guna memperkaya pengetahuan dan keterampilan para pengawas. Hadir 15 narasumber dari regulatori dan praktisi di bidang ATMP pada workshop ini, terdiri atas 7 narasumber dari Indonesia dan 8 narasumber global dari Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, National Institute of Food and Drug

Safety Evaluation (NIFDS) Korea Selatan, European Medicines Agency (EMA) Uni Eropa, United States Food and Drug Administration (US FDA), Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang, Sarepta Therapeutics, Myltenyi Biotech, dan Novartis.

Kepala BPOM Taruna Ikrar yang membuka kegiatan menyampaikan bahwa *workshop* ini merupakan bentuk penguatan dan peningkatan kapasitas evaluator dan inspektur BPOM dalam menilai dan mengawasi produk ATMP sebelum dan sesudah produk dipasarkan. “Kegiatan ini adalah manifestasi dukungan BPOM kepada industri farmasi, peneliti, dan praktisi klinis terhadap pengembangan ATMP dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di masa depan,” ungkapnya.

Ke depannya diharapkan akan semakin banyak produk ATMP yang dikembangkan dan mendapat izin edar BPOM, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam pengobatan pasien. Kepala BPOM mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun masa depan *advanced therapy* di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengobatan ATMP yang aman, mudah diakses, dan efektif.

Komitmen pengembangan ATMP ini telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. BPOM bahkan telah menyelenggarakan Forum Lintas Sektor “Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Berbasis Sel dan Jaringan” di Jakarta Rabu, (9/8/2023). Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah pusat, BRIN, perguruan tinggi, pelaku usaha,

serta asosiasi dan organisasi profesi.

Perlu dicatat bahwa Kepala BPOM juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap penawaran terapi ATMP yang belum terbukti keamanannya. Pastikan produk ATMP telah mendapatkan izin edar BPOM dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang terdaftar. Penggunaan produk ATMP yang tidak terjamin keamanan dan mutunya dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Jika ragu, masyarakat disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis atau mencari informasi resmi melalui layanan publik BPOM.

Harapan Baru

Meningkatnya kasus penyakit degeneratif di masyarakat telah memicu peningkatan minat dan penelitian dalam bidang pengobatan regeneratif. Tren dalam pengembangan obat juga telah bergeser ke arah produk biologi dan ATMP, yang terbukti dari pertumbuhannya yang signifikan di pasar global. Bahkan, perkembangan terbaru dalam *advanced therapy* ini telah mendapat sambutan positif dari akademisi dan pelaku usaha di Indonesia. Pengembangan dan aksesibilitas produk berbasis sel dan jaringan menjadi sangat penting bagi masa depan pengobatan yang lebih efektif.

ATMP hadir memberikan sebuah harapan baru pengobatan inovatif untuk penyakit yang sebelumnya sulit/tidak dapat disembuhkan. BPOM berkomitmen mengawal pengembangan ATMP dengan menjamin keamanan, khasiat, dan mutunya sesuai dengan aturan yang berlaku. ■



Kepala BPOM membuka kegiatan Workshop ELEVATE di Jakarta, Senin (7/10/2024)



Forum Lintas Sektor "Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Berbasis Sel dan Jaringan" di Jakarta Rabu, (9/8/2023).

Capaian Penerbitan Izin Edar PANGAN OLAHAN

2020--2024



BerAKHLAK



BADAN POM RI
APLIKASI E-REGISTRATION

Beranda

Registrasi Akun

Informasi

JUMLAH IZIN EDAR PANGAN OLAHAN YANG DITERBITKAN SELAMA 2020--2024 SEBANYAK 152.874 DENGAN PERTUMBUHAN KUMULATIF SELAMA 4 TAHUN SEBESAR 44,62%.



KONSUMSI OBAT DAN MAKANAN YANG SUDAH TERDAFTAR DI BPOM
KARENA TERJAMIN KEAMANAN DAN MUTUNYA

cekbpom.pom.go.id



Penulis : Devi Oktaviani
Editor : Hendriq Fauzan Kusfanto

Bingkah Akhir Tahun 2024: Rayakan Sederet Prestasi BPOM, Menuju Regulator Kelas Dunia

Jelang akhir tahun 2024, BPOM tidak ambil lengah. Kepemimpinan baru di bawah Taruna Ikrar terus menancapkan gasnya untuk melayani dan melindungi masyarakat. Mimpi besar BPOM untuk menjadi regulator kelas dunia terejawantahkan oleh sederet prestasi gemilang dari pertengahan hingga penghujung tahun. Prestasi ini tidak hanya tentang obat dan makanan, namun menyentuh ranah pelayanan perizinan, inovasi hingga ranah kehumasan. Mari teropong satu per satu.

Penghargaan Terbaik 3 Anggota JDIHN Tahun 2024



BPOM memboyong penghargaan Terbaik 3 Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024 Kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) pada Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, Kamis (22/8/2024). Prestasi ini tak mudah karena BPOM harus bersaing dengan 1.617 instansi anggota JDIHN, dengan 1.234 instansi di antaranya telah terintegrasi dengan portal <https://jdihn.go.id/>.

BPOM sendiri telah menjadi anggota JDIHN sejak 9 September 2019. Portal

JDIH BPOM yang dapat diakses melalui tautan <http://jdih.pom.go.id> telah terintegrasi dengan JDIHN. Hingga 11 Februari 2025, terdapat 1.548 produk hukum yang dapat diakses masyarakat di portal JDIH milik BPOM ini, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui prestasi ini, BPOM berharap portal JDIH BPOM yang terintegrasi dengan JDIHN dapat menjadi sumber daya hukum yang lengkap, karena terdiri dari koleksi peraturan perundang-

undangan serta dokumen dan informasi pendukung lainnya.

Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024

BPOM raih penghargaan dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 atas kinerja pelayanan investasi terbaik di kategori Lembaga pada Senin (30/9/2024).

BPOM menerima penghargaan dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kategori Kementerian Negara atau Lembaga pada Senin (30/9/2024). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pelayanan investasi terbaik yang diberikan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, hingga wilayah khusus di kawasan timur Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Sebagai salah satu pemenang, BPOM terus berinovasi dalam pelayanan publik termasuk kemudahan dalam hal perizinan di sektor industri obat dan makanan. Langkah-langkah seperti pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan percepatan izin edar menjadi prioritas BPOM dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.



Penghargaan Terbaik 3 Anggota JDHIN Tahun 2024 dengan kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian diraih BPOM, Kamis (22/8/2024).



BPOM raih penghargaan dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 atas kinerja pelayanan investasi terbaik di kategori Lembaga pada Senin (30/9/2024).

Penghargaan Inovasi Pelayanan Inovasi Terbaik Tahun 2024

Dalam acara Gebyar Pelayanan Prima yang digelar di Jakarta, BPOM meraih pencapaian luar biasa dengan dianugerahi penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Terbaik Tahun 2024 dalam kategori Lembaga oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (8/10/2024). Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas upaya BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan publik. Keberhasilan BPOM semakin terang dengan pencapaian signifikan lainnya, berupa 7 penghargaan untuk inovasi dari unit pelaksana teknis dan unit kerja BPOM. Semua pencapaian ini menjadi landasan kuat bagi BPOM untuk terus berinovasi, melangkah maju, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, BPOM berkomitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Penghargaan prestisius dari Kementerian PANRB ini bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi juga menjadi

pendorong semangat baru untuk terus berinovasi. Dengan tekad yang semakin kuat, BPOM siap memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Penghargaan The 6th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024

Sebanyak 7 penghargaan berhasil diborong BPOM dalam Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 di Yogyakarta pada Jumat (11/10/2024). Ketujuh penghargaan ini menjadi bagian dalam 106 karya terbaik AHI 2024 dari keseluruhan 240 karya yang dikirimkan oleh 62 instansi. Penghargaan yang diraih BPOM mencakup berbagai kategori dalam pelayanan informasi publik.

BPOM mendapatkan 3 penghargaan dengan predikat *Gold Winner*, yaitu Kategori Program Kehumasan Pemerintah Subkategori Lembaga; Kategori Pelayanan Informasi Publik Subkategori Ruang Pelayanan Informasi Publik, dan Kategori PPID Terbaik Subkategori PPID Pelaksana Terbaik yang diraih Balai Besar POM di Bandar Lampung. Selanjutnya Predikat *Silver Winner* diraih BPOM untuk Kategori Kanal Digital Subkategori Media Sosial

Instagram. Untuk predikat *Bronze Winner*, BPOM juga meraih 3 penghargaan, yaitu Kategori Pelayanan Informasi Publik pada Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik, Subkategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik, serta Kategori PPID Terbaik Subkategori PPID Utama.

Bukti Nyata

Di penghujung tahun ini, BPOM dengan bangga mencatatkan serangkaian prestasi yang mengesankan, mulai dari penguatan sistem pengawasan obat dan makanan hingga peningkatan efisiensi dalam proses perizinan. Setiap pencapaian ini bukan hanya mencerminkan dedikasi, tetapi juga komitmen untuk senantiasa melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan. Dengan semangat yang terus berkobar, BPOM menatap tahun 2025 dengan optimisme tinggi, siap melangkah lebih jauh dan memberikan pelayanan terbaik yang akan membawa dampak positif bagi Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti nyata akan peran vital BPOM dalam mengawasi obat dan makanan di Indonesia. ■



Pencapaian luar biasa BPOM sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Terbaik Tahun 2024 dalam kategori Lembaga oleh Kementerian PANRB, Selasa (8/10/2024).



BPOM borong 7 penghargaan AHI 2024 di Yogyakarta, Jumat (11/10/2024).

Penghargaan untuk Inovasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja BPOM





Penulis : Nelly L. Rachman
Editor : Dian Hermawati

Senin (19/8/2024), menjadi momen bersejarah bagi dokter lulusan Universitas Hasanuddin (Unhas) ini. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/PPA Tahun 2024, Taruna Ikrar resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Kepala BPOM oleh Presiden RI Joko Widodo. Pelantikan ini menandai penggantian kepemimpinan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM L. Rizka Andalusia, sekaligus menjadikannya sebagai Kepala BPOM yang ke-7 setelah Penny K. Lukito.

Perjalanan Akademik Sebagai Ilmuwan

Lahir dalam keluarga yang sederhana namun sarat dengan nilai pendidikan, Taruna Ikrar tumbuh menjadi figur inspiratif yang membawa kontribusi besar bagi dunia kesehatan di Indonesia. Menjadi seorang dokter adalah impiannya sejak kecil. SD Inpres Karuwisi 1 Makassar, SMP Negeri 8 Makassar, dan SMA Negeri 1 Makassar menjadi saksi perjalanan sekaligus perjuangannya untuk meraih mimpi tersebut. Selepas SMA, Taruna Ikrar memantapkan hati untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin (Unhas). Tak puas belajar, Taruna Ikrar melanjutkan perjalanannya di Universitas Indonesia, tempat ia kemudian meraih gelar Magister Ilmu Biomedik pada tahun 2003.

Perjalanan akademik Taruna Ikrar dipenuhi dengan prestasi yang tak semua orang bisa raih. Keberhasilannya meraih beasiswa Monbukagakusho dari Pemerintah Jepang membawanya melanjutkan pendidikan doctoral di Universitas Niigata. Di sana, ia fokus pada spesialisasi *cardiovascular and vital control*, yang berhasil diselesaikannya dengan gemilang pada tahun 2008.

Semangat untuk terus belajar kemudian membawanya ke Amerika Serikat, di mana ia menjalani program

Menjulang, Membumi, Mengakar Dari Ilmuwan Menjadi Birokrat

Dengan penampilan rapi mengenakan kemeja putih, jas hitam, dasi merah, dan peci hitam, ia berdiri tegap di depan podium yang dihiasi deretan mikrofon dengan logo berbagai media massa. Dengan percaya diri, ia memperkenalkan dirinya kepada para jurnalis yang berkumpul di Istana Kepresidenan Jakarta. "Nama saya Taruna Ikrar. Hari ini saya dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia," ucapnya dengan tegas, mengawali peran barunya dalam sejarah BPOM.



post-doctoral bidang neurosains di School of Medicine, University of California pada periode 2008–2013. Di sana, ia memperdalam keahlian dan pengetahuannya, memberikan kontribusi besar dalam dunia kedokteran dan penelitian.

Transisi ke Dunia Birokrasi

Lebih dari 20 tahun Taruna Ikrar menghabiskan waktunya sebagai ilmuwan biomedis, dengan keahlian dalam bidang farmakologi, kardiologi, dan neurosains. Ia dikenal sebagai pionir dalam pengembangan teknik pencitraan fungsional serta terapi sel dan gen, yang membawa terobosan dalam pengobatan penyakit langka. Perjalanan karirnya yang beragam mencakup peran sebagai tenaga medis, peneliti, staf akademik,

hingga manajer, menjadikannya sosok dengan pengalaman yang sangat luas.

Taruna Ikrar memulai karir di BPOM pada 2002 sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), membuka jalan bagi kontribusinya dalam pengawasan obat dan makanan. Di saat bersamaan, ia memegang berbagai posisi strategis, termasuk menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adjunct Professor di Universitas Hasanuddin, dan Penasihat Senior di Rumah Sakit Kepresidenan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Pada 2020, ia kemudian dipercaya menjadi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan pada 2021, terpilih sebagai Direktur Konsil Dokter Internasional (International Association of Medical Regulatory Authorities/IAMRA).

Posisi tersebut semakin memperkuat pengaruhnya di dunia kesehatan global.

Saat ditanya bagaimana perasaannya dilantik menjadi Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengungkapkan rasa bangga karena telah dipercaya memegang amanah tersebut. "Tentu bahagia dan bangga, dibarengi dengan perasaan ada beban, ini amanah yang berat," ujarnya.

Ia menyadari beratnya tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi lembaga strategis yang berperan besar memastikan keamanan obat dan makanan demi kesehatan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kinerja pengawasan BPOM sangat kompleks. Berbicara tentang obat dan makanan yang registrasinya ditangani BPOM, Taruna Ikrar katakan, "Dimulai dari pengawasan, dari hulu sampai hilir. Bagaimana *manufacturing, good clinical practices*, dan sebagainya, sampai bagaimana keluar izin edarnya untuk dipasarkan. Tanggung jawab dan bebannya tentu sangat berat, tanggung jawab terhadap 282 juta penduduk Indonesia sekarang," tuturnya sesaat setelah dilantik menjadi Kepala BPOM.

Taruna Ikrar mengungkapkan ada 5 prioritas yang diamanatkan Presiden RI, Joko Widodo kala itu, kepada BPOM. Pertama, memastikan produk pangan olahan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat Indonesia aman, bermutu, dan bergizi. Kedua, memastikan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga yang berkepentingan dalam pengawasan obat dan makanan. Ketiga dan keempat, mendukung kemandirian ketersediaan obat di dalam negeri serta mempercepat uji klinik obat hingga dapat segera diedarkan dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Terakhir, menjadikan BPOM sebagai regulator pengawas obat dan makanan yang sejajar dan setara dengan negara maju di tingkat global.



"Saya melihat BPOM ini lembaga yang sangat penting, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Tetapi masih perlu ditingkatkan kerja samanya dengan berbagai stakeholder."

TARUNA IKRAR



Kepemimpinan di BPOM

Dalam menjalankan perannya sebagai Kepala BPOM, Taruna Ikrar melaksanakan filosofi manajerial yang ia sebut sebagai prinsip menjulang, membumi, dan mengakar. "Menjulang artinya setiap pemimpin itu punya visi, punya *goal*, punya cita-cita. Visi ini harus tinggi, jangan visi seperti yang kemarin bahkan lebih jelek dari sebelumnya, tidak boleh. Dia harus tinggi," jelasnya saat menjadi narasumber dalam Podcast KataBPOM (September 2024). "Kita harus pikirkan setinggi mungkin yang mampu kita capai," lanjutnya. Dikaitkan dengan lembaga, berarti setinggi apa, semampu apa BPOM bisa berjuang secara maksimal untuk menggapai tujuannya.

Visi tersebut harus diterjemahkan dalam berbagai macam hal yang mampu dilaksanakan, inilah yang disebut dengan prinsip membumi. Dengan begitu, aturan yang nantinya dilahirkan oleh BPOM, baik itu berupa keputusan, peraturan, surat edaran, atau berbagai macam kebijakan lainnya harus bisa terealisasi dan teraplikasi, serta bisa dilaksanakan.

"Tetapi kalau cuma sekedar seperti itu, tidak ada sukmanya, tidak ada rohnyanya. Untuk rohnyanya bisa tercapai, dia harus mengakar," ungkap ayah 3 orang anak ini. Kebijakan BPOM yang akan berdampak pada masyarakat, pegawai, dan organisasi harus dapat mengakar ke relung sukma pegawai, masyarakat, dan rakyat secara umum. Jika dapat mengimplementasikan prinsip menjulang, membumi, dan mengakar ini, maka BPOM sebagai lembaga yang sangat penting dalam meregulasi obat dan makanan, bisa berperan dengan baik dan

berkontribusi kepada masyarakat dan negara.

Dalam memimpin BPOM, Taruna Ikrar menanamkan visi bahwa BPOM harus menjadi lembaga yang selevel dengan reputasi lembaga-lembaga badan pengawas obat dan makanan di dunia, seperti Amerika Serikat melalui U.S. Food and Drug Administration, yang reputasinya bersifat global. Sementara berkaitan dengan aturan, pria yang gemar olahraga lari ini menegaskan perlunya restrukturisasi dan reformasi BPOM. Ia berencana melakukan restrukturisasi agar organisasi BPOM, yang sekarang cenderung berbasis komoditas (Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; serta Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan), berubah menjadi berbasis fungsi, seperti Deputi Bidang Penindakan.

Taruna Ikrar juga merasa BPOM belum optimal melayani masyarakat dari Sabang sampai Merauke karena baru memiliki 73 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Ia menginginkan adanya penambahan Pos POM dan Loka POM baru, terutama di wilayah kota dan kabupaten yang saat ini berjumlah kurang lebih 514.

Rencana Taruna Ikrar lainnya yang tak kalah penting adalah mempercepat inovasi obat-obat baru, mengikuti penemuan dan perkembangan obat di dunia, terutama obat-obat biologi. Kepala BPOM ke-7 ini pun mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan mendukung BPOM untuk lebih optimal dalam melakukan tugas pengawasan obat dan makanan. ■



GALERI

BPOM Education Expo 2024



Kepala BPOM Taruna Ikrar menyapa salah satu peserta pada pameran BPOM Education Expo 2024 di Kantor BPOM (19/8/2024). Pameran beasiswa ini diadakan untuk memfasilitasi perkuatan kualitas 5.000 lebih SDM BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia.



Talkshow interaktif pada BPOM Education Expo 2024 menghadirkan salah satunya Indonesia-Campus Spain yang diwakili oleh Country Manager Anton Hilman (19/8/2024). Selain itu, narasumber dari Representatif of Uni Italia Aiko Komala, Chief of Assessment Officer Indonesian International Education Foundation (IIEF) Wiati Rahay, dan narasumber dari platform beasiswa lainnya.



Diskusi pegawai BPOM terkait pengajuan beasiswa di salah satu booth pada BPOM Education Expo 2024 di Kantor BPOM (19/8/2024). Expo yang berlangsung selama 2 hari ini dapat diikuti oleh peserta umum serta menghadirkan berbagai platform penyedia beasiswa yang dapat dimanfaatkan bagi mereka yang berminat mengejar beasiswa ke luar negeri.



Expo yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan berbagai platform penyedia beasiswa yang dapat dimanfaatkan bagi mereka yang berminat mengejar beasiswa ke luar negeri, seperti Indonesia Scholarship Center; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas; American Indonesia Exchange Foundation (AMINEF)-Fulbright Indonesia; Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID); DAAD Indonesia; dan Beasiswa Monbukagakusho/MEXT (Beasiswa Pemerintah Jepang).

IKN



Kepala BPOM RI Taruna Ikrar bersama beberapa pejabat BPOM melakukan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (25/9/2024). Kunjungan ini diawali dengan pemantauan langsung lahan BPOM yang telah disiapkan di kawasan IKN, sebagai bagian dari rencana pengembangan infrastruktur kelembagaan BPOM di ibu kota baru Indonesia.



Trem Otonom melakukan uji coba di wilayah Ibu Kota Nusantara (25/9/2024). Alat transportasi ini nantinya akan beroperasi di lalu lintas campuran (mixed traffic) tanpa memerlukan masinis. Trem ini merupakan salah satu inovasi unggulan transportasi masa depan di Indonesia.



Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjajal Trem otonom yang berada di Ibu Kota Nusantara (25/9/2024). Tampak Kepala BPOM berdiskusi dengan Tim PT Industri Kereta Api (Persero)



Tampak depan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) (25/9/2024). Desain dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang akan dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi.

Penyerahan Sertifikat CPOB PT Daewoong



Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menandatangani prasasti tanda peresmian lokasi produksi PT Daewoong Biologics Indonesia, di Cikarang Timur, Kamis (12/9/2024).



Kepala BPOM RI Taruna Ikrar secara resmi menyerahkan Sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) kepada PT Daewoong Biologics Indonesia, Kamis (12/9/2024). Pemberian sertifikat CPOB untuk fasilitas pengembangan terapi berbasis sel punca ini dilakukan bersamaan dengan *grand opening* PT Daewoong Biologics Indonesia di Cikarang Timur.



Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, Ketua Komite Nasional Sel Punca Amin Soebandrio W. Kusumo, Perwakilan Pemerintah Korea Selatan dan jajaran PT Daewoong Biologics Indonesia secara simbolis meresmikan fasilitas produksi PT Daewoong Biologics Indonesia di Cikarang Timur (12/9/2024).



Kepala BPOM RI Taruna Ikrar meninjau ruang produksi milik PT Daewoong Biologics Indonesia di Cikarang Timur (12/9/2024).

World Food Safety Day 2024



BPOM bersama Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menggelar peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day) 2024, di One Satrio, Jakarta pada Kamis (4/7/2024). Peserta World Food Safety Day 2024 mendapat kesempatan untuk berdiskusi dalam *talkshow* terkait keamanan pangan.



Siswa berseragam Pramuka memperhatikan hasil uji pada pangan yang dilakukan petugas BPOM (5/7/2024). Dalam kegiatan World Food Safety Day 2024, masyarakat termasuk pelajar didedukasi terkait keamanan pangan salah satunya menggunakan mobil laboratorium keliling Balai Besar POM di Jakarta.



Kegiatan "Meet Market Nuansa" pada 7--8 Oktober 2024 menjadi platform yang mempertemukan UMK obat bahan alam dengan penyedia layanan sistem tata udara (STU). STU menjadi salah satu poin penting untuk menjamin proses produksi obat bahan alam terhindar dari kontaminasi.

Membangun Kualitas Obat Tradisional: Sinergi UMK dan Sistem Tata Udara



Penulis : Maulvi M. Adib
Editor : Dian Hermawati

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di mana teknologi dan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian manusia, terdapat warisan budaya yang terus bertumbuh, yaitu obat bahan alam. Semenjak pandemi COVID-19, obat yang memanfaatkan kekayaan alam ini terus berkembang sebagai alternatif pengobatan bagi masyarakat.

Menurut data BPOM hingga Januari 2025, terdapat lebih dari 21.486 *item* produk obat bahan alam yang telah terdaftar. Angka ini meningkat 4.203 *item* dari tahun sebelumnya. Produsen obat bahan alam tidak hanya berasal dari industri besar, namun usaha mikro dan kecil (UMK) turut berkecimpung di komoditas ini.

Sampai dengan Desember 2024, ada 1.043 UMK obat bahan alam yang sudah mendaftarkan produknya ke BPOM. Meskipun masih berskala UMK, para pelaku usaha tetap diharuskan memenuhi standar cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) agar produknya aman, berkhasiat, dan bermutu. Namun, dalam penerapan CPOTB, para pelaku

usaha masih menemukan beberapa kendala, salah satunya dalam sistem tata udara (STU).

Sebagai regulator pengawasan, BPOM punya andil untuk memfasilitasi para pelaku UMK agar mampu memenuhi standar yang sesuai ketentuan. Oleh karena itu, BPOM menggelar "Meet Market Nuansa". Kegiatan yang

diselenggarakan di Jakarta pada 7--8 Oktober 2024 ini merupakan sebuah platform yang mempertemukan UMK obat bahan alam dengan penyedia layanan STU.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Mohamad Kashuri, dalam sambutannya, menjelaskan bahwa standar CPOTB yang harus dipenuhi oleh UMK adalah merencanakan upaya dari BPOM dan pelaku usaha untuk memastikan produk obat bahan alam yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu. Salah satu aspek teknis yang sangat penting dalam CPOTB adalah sistem bangunan dan fasilitas, yang di dalamnya tercakup juga aturan tentang penggunaan STU.

"Kualitas udara yang terjaga dengan baik adalah kunci untuk memastikan bahwa proses produksi berlangsung dalam kondisi yang optimal, mengurangi risiko kontaminasi, dan menjaga stabilitas bahan aktif dalam produk obat tradisional," lanjut Kashuri.

Pada kegiatan "Meet Market Nuansa", pelaku UMK mendapat pengetahuan mengenai CPOTB dan STU yang bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka nanti. Narasumber yang memberikan materi, yaitu Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Rustyawati, Tim Ahli CPOTB Widiastuti Adiputra, *sharing session* oleh Kepala Balai POM di Bogor Jeffeta Pradeko Putra, perwakilan Gabungan Pengusaha Jamu M. Fajaruddin, serta narasumber eksternal dari Heating, Ventilation, and Air-Conditioning (HVAC) Engineer Daniel Alam Subiru.

Rustyawati menyampaikan bahwa obat bahan alam mempunyai risiko kontaminasi dalam produksi. Salah satu sumber kontaminasi adalah melalui udara dan dapat menyebabkan *cross*



Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri saat menyampaikan paparan pada kegiatan "Meet Market Nuansa".

contamination dari bahan/produk yang berbeda dan cemaran mikrobiologi. Sementara Widiastuti menekankan bahwa desain fasilitas, HVAC, dan peralatan adalah langkah awal dan penting dalam mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang.

Sementara Jeffeta memaparkan bahwa sistem HVAC di fasilitas laboratorium/produksi memiliki dampak langsung kepada mutu produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain suhu, kelembapan, tekanan, aliran udara, dan kebersihan udara (partikel dan mikroba). M. Fajaruddin juga mengingatkan 3 hal penting dalam menerapkan HVAC, yaitu perencanaan (analisis, kesiapan, dan kualifikasi vendor), penerapan (tahapan penerapan dengan berbagai tantangan dan peluang), dan perawatan (merawat keseluruhan sistem HVAC dari kabel maupun filter).

Dalam penerapan STU yang baik tentu menghadapi tantangan dari sisi sumber daya finansial dan teknis. Maka dari itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber HVAC *Engineer* dan *vendor* HVAC. Daniel Alam Subiru

menyampaikan solusi desain HVAC yang *cost-effective* untuk desain baru maupun terhadap instalasi yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan. Menurutnya, desain HVAC yang efektif dibuat dengan memastikan *layout*, kajian risiko produk, parameter, dan merek material beserta alternatifnya.

Pada event ini juga, para pelaku UMK obat bahan alam dipertemukan dengan para vendor HVAC. Dalam kesempatan tersebut, mereka saling berdiskusi secara langsung mengenai kendala-kendala teknis yang dihadapi di lapangan serta berupaya menemukan solusi untuk mengatasinya.

Kegiatan "Meet Market Nuansa" yang digagas BPOM ini bukan hanya tentang pembahasan pentingnya STU untuk menjaga mutu produk obat bahan alam. Hal yang lebih penting adalah tentang bagaimana UMK dapat mengimplementasikan STU sehingga dapat memastikan bahwa setiap produk obat bahan alam yang dihasilkan oleh UMK memiliki kualitas yang dapat dibanggakan dan dipercaya oleh konsumen. ■



Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM Rustyawati menyampaikan udara berpotensi menjadi sumber kontaminasi pada proses produksi obat bahan alam



Para peserta kegiatan "Meet Market Nuansa" berdiskusi secara langsung bersama vendor HVAC mengenai kendala teknis yang dihadapi seputar STU



Kedeputian Bidang Penindakan BPOM dan Criminal Investigations Division MFDS bersama para stakeholder pengawasan obat dan makanan di Indonesia

Sinergi Lintas Negara: Indonesia-Korea Selatan Tegas, Lawan Kejahatan Obat dan Pangan Berbahaya

Jakarta - “*Annyeong haseyo*,” sapaan halus yang memecah keheningan siang itu. Lima orang delegasi Korea tampak berjalan pelan dengan senyum ramah dan menyapa para pegawai berseragam yang sudah duduk dengan rapi pada meja-meja bundar di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM pagi itu.

Rabu (4/12/2024), BPOM RI dan Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea Selatan melaksanakan pertemuan strategis antar-regulator, secara spesifik pada divisi atau bidang penindakan. Pertemuan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yaitu Kejaksaan Agung, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (Bareskrim Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional, serta perwakilan dari beberapa unit teknis terkait di BPOM.

Pertemuan ini merupakan bagian dari program *benchmarking* oleh tim Criminal Investigations Office MFDS Korea Selatan

ke BPOM yang diagendakan selama 2 hari. Pertemuan yang diagendakan dalam bentuk *sharing information* ini bertujuan memperdalam kerja sama strategis antar-regulator dalam menangani dan menindak kejahatan di sektor obat dan makanan.

Pertukaran informasi dalam pertemuan ini mencakup pengembangan sistem pencegahan dini, penanganan sistem cepat dari kasus kejahatan obat dan makanan, penguatan pengawasan obat dan makanan pada lintas batas, dan peningkatan kapasitas investigasi secara digital. Kegiatan ini menjadi pertanda penting terhadap upaya penguatan



Penulis : Nesha PRM Sitompul
Editor : Dian Hermawati

pengawasan lintas negara di era digitalisasi saat ini.

Belajar Bersama: Tindak dan Lawan

Direktur Criminal Investigations Office MFDS Korea Selatan Young Jo Kim, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya pertukaran informasi antara kedua lembaga. “Kolaborasi antara kedua regulator, terutama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kejahatan di sektor obat dan makanan,” ujarnya. “Kolaborasi ini tentu akan memperkuat kapasitas kedua negara dalam menghadapi tantangan serta menindak kejahatan keamanan obat dan makanan yang kini semakin kompleks,” tambah Kim.

Setali tiga uang dengan pernyataan Young Jo Kim, Direktur Penindakan BPOM Azis Saputra juga menggarisbawahi bahwa kerja sama ini merupakan respons terhadap kompleksitas tantangan global. “BPOM mempelajari program strategis dan kerangka operasional yang diterapkan oleh tim dari Criminal Investigation Division MFDS Korea. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pegawai BPOM, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya global untuk memastikan keamanan obat dan makanan,” tuturnya.

Azis juga menegaskan bahwa kejahatan di sektor obat dan makanan kini telah berkembang secara multidimensi, memanfaatkan teknologi digital, dan memungkinkan adanya mobilitas informasi tanpa batas negara. Oleh karenanya, hal ini membutuhkan pendekatan kolaboratif yang semakin terintegrasi.

Pada kesempatan ini, tim dari Criminal Investigation Division MFDS Korea Selatan berbagi pengalaman dalam menangani kejahatan berbasis teknologi,

termasuk pengembangan forensik digital untuk investigasi kasus. Mereka menyampaikan 3 topik menarik mengenai penanganan dan penindakan obat dan makanan yang mereka terapkan di Korea Selatan sebagai berikut:

tetapi juga tentang membangun komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi masyarakat Indonesia dan Korea Selatan.

Pertemuan strategis ini juga menghasilkan salah satu terobosan

bagaimana mode penindakan atau pemberantasan kejahatan obat dan makanan.

Goals Bersama

Melalui kolaborasi yang terjalin antara BPOM dengan MFDS, BPOM berharap dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, khususnya kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan lintas negara. Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keamanan konsumen di Indonesia, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya global untuk memastikan keamanan produk obat dan makanan.

BPOM dan MFDS adalah contoh langka dari regulator yang memiliki unit kerja khusus untuk pemberantasan kejahatan di sektor obat dan makanan. Pengalaman kedua lembaga ini dapat menjadi contoh atau model pengembangan kapasitas serupa bagi regulator lainnya di kawasan Asia. Melalui kolaborasi ini, tentu tidak hanya akan memperkuat pengawasan, tetapi juga membangun fondasi untuk diplomasi kesehatan dan ekonomi yang lebih kuat di kawasan Asia, dimulai dari sisi preventif hingga mekanisme penanganan kasusnya.

Sebagai hasil dari gagasan bersama, kerja sama BPOM-MFDS ini semakin menegaskan komitmen kedua negara dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor ini.

Bergerak bersama, tindak tegas dan lawan kejahatan obat dan makanan, untuk Indonesia Aman! ■



Secara umum, MFDS menyampaikan bahwa dalam setiap kasus obat dan makanan yang terjadi, MFDS menekankan pentingnya pengumpulan bukti yang otentik dan terintegritas, serta proses investigasi yang transparan untuk memastikan keabsahan di pengadilan. Teknologi yang digunakan mencakup analisis data perangkat *mobile*, pengujian laboratorium, serta teknik pemantauan melalui media sosial dan CCTV. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan memperkuat kapasitas penindakan BPOM dalam menghadapi ancaman lintas batas serta meningkatkan keamanan masyarakat dari produk yang berisiko.

penting, yaitu usulan untuk pembentukan forum regional yang melibatkan *national regulatory authorities* (NRA) dari kawasan Asia. Forum ini diproyeksikan dapat menjadi *platform* diskusi rutin dalam membahas dinamika kejahatan obat dan makanan serta memperkuat pengawasan lintas batas atau lintas negara. Selain itu, pertemuan ini menjadi *platform* bagi BPOM untuk belajar dan mengadopsi pendekatan inovatif dari MFDS agar memiliki *framing* yang sama mengenai

Hasil Pertemuan: Strategi dan Komitmen

Diskusi mendalam pada kesempatan ini menghasilkan berbagai usulan strategis, termasuk rencana pengembangan pelatihan forensik digital dan pertukaran data intelijen. Dalam konteks nasional, BPOM mengusulkan sistem penanganan dini untuk kasus-kasus emergensi yang mendapat apresiasi positif dari MFDS. Sinergi ini bukan hanya tentang berbagi informasi,



Delegasi MFDS Korea Selatan berkesempatan berkunjung ke BPOM Command Center dan berdiskusi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia



Penulis : Rahma Yulianti
Marina Tata Ulina
Editor : Dian Hermawati

Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Suplemen Kesehatan di Kawasan ASEAN

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membawa dampak besar bagi perekonomian global, termasuk untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Namun, ASEAN menunjukkan ketahanan luar biasa dan mampu bangkit dengan cepat. Hal ini terlihat dari kembalinya arus investasi langsung luar negeri di ASEAN yang mencapai 174 miliar dolar pada tahun 2021.



Salah satu faktor utama di balik pemulihan ini adalah perkembangan industri, terutama di sektor manufaktur, teknologi digital, dan farmasi. Ketiga sektor ini mengalami percepatan pertumbuhan seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi serta kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan inklusif. Ini membuktikan bahwa ASEAN tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang dan menarik minat investor untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Harmonisasi di Bidang Suplemen Kesehatan

BPOM memiliki peran strategis dan krusial dalam mendukung perkembangan industri di bidang farmasi, termasuk industri suplemen kesehatan. Salah satu kontribusi BPOM adalah perannya dalam harmonisasi di kawasan ASEAN yang bertujuan menciptakan keseragaman

standar regulasi di antara negara-negara anggota.

BPOM merupakan *focal point* Indonesia dalam Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group (TMHS PWG) yang dibentuk pada tahun 2004, di bawah naungan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) yang merupakan tindak lanjut dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN di Bali pada 2003 silam. TMHS PWG berfungsi sebagai forum bagi negara anggota untuk membahas dan menyepakati standar teknis, persyaratan keamanan, mutu, serta klaim manfaat produk di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan.

BPOM berpartisipasi aktif di forum tersebut untuk memastikan standar yang berlaku di Indonesia sejalan dengan standar regional ASEAN. Adanya harmonisasi ini memungkinkan produk suplemen kesehatan lokal untuk dapat lebih mudah memasuki pasar regional



tanpa menghadapi hambatan regulasi yang kompleks, terutama dalam mengatasi hambatan non-tarif.

Perkembangan Industri Suplemen Kesehatan Indonesia

Dampak lain dari pandemi juga membawa perubahan signifikan pada pola perilaku kesehatan masyarakat global. Fokus sebelumnya pada pengobatan kuratif perlahan bergeser ke pendekatan preventif, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui konsumsi suplemen kesehatan, termasuk multivitamin. Tren ini juga melanda ASEAN, yang dengan populasi lebih dari 680 juta jiwa telah menjadi salah satu basis konsumen terbesar di dunia. Peningkatan potensi pasar suplemen kesehatan di ASEAN tentu saja semakin mendorong pertumbuhan industri yang pesat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain berperan dalam harmonisasi, BPOM juga terus mendukung industri suplemen kesehatan di Indonesia untuk

terus berinovasi dan bertumbuh. BPOM memiliki berbagai program pelatihan, pendampingan teknis, dan penyediaan akses informasi kepada pelaku usaha. BPOM juga melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait memperkuat upaya ini sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan daya saing produk suplemen kesehatan Indonesia di pasar ASEAN.

Perlindungan Masyarakat terhadap Produk Suplemen Kesehatan Substandar

Perkembangan dinamika di bidang suplemen kesehatan ini membawa tantangan besar dalam memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Tanpa pengawasan yang memadai, terdapat risiko besar terhadap kesehatan masyarakat akibat peredaran produk yang tidak terjamin kualitasnya.

Sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia, BPOM bertanggung jawab untuk memastikan

setiap produk suplemen kesehatan yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu yang telah ditetapkan sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM melakukan pengawasan secara komprehensif baik di *pre-market* maupun *post-market*.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan inovasi teknologi, penguatan kapasitas pelaku usaha, dan adaptasi terhadap persyaratan pasar internasional, peran BPOM akan semakin luas. Hal ini tidak hanya berdampak pada perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pendekatan yang holistik, BPOM membantu menciptakan industri suplemen kesehatan yang kompetitif, berkelanjutan, dan berbasis keunggulan lokal, menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negara sendiri dan tamu terhormat di kawasan ASEAN. ■



The infographic features a blue background with a map of Southeast Asia on the left, marked with pins and flags of ASEAN member states. In the center, there is a stylized icon of a group of people under a sun. To the right, the text '680 Juta Jiwa Pasar Suplemen Kesehatan di ASEAN' is displayed in large, bold letters. Below this, there is an illustration of various health supplement products, including bottles, capsules, and pills. At the bottom right, the words 'Suplemen Kesehatan' are written in a large, white, sans-serif font.





Capaian Penerbitan Izin Edar

OBAT BAHAN ALAM, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Januari--Desember 2024



PADA JANUARI--DESEMBER 2024, BPOM TELAH MENERBITKAN 129.532 NOMOR IZIN EDAR PRODUK KOSMETIK, OBAT BAHAN ALAM, DAN SUPLEMEN KESEHATAN



KONSUMSI OBAT DAN MAKANAN YANG SUDAH TERDAFTAR DI BPOM
KARENA TERJAMIN KEAMANAN DAN MUTUNYA

cekbpom.pom.go.id



Hamparan hutan sagu yang indah di sepanjang pesisir Pantai Negeri Rutong, Ambon, Maluku.



Penulis : Yanuar Rahman
 Editor : Fathan Nur Hamidi

Pesona Negeri Rutong: Sejuta Keindahan di Timur Indonesia

Ingin merasakan pesona alam dan budaya yang memikat, tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Pulau Ambon, terdapat sebuah desa yang menyimpan sejuta keindahan, yaitu Negeri Rutong. Terletak di Leitimur Selatan, desa ini menawarkan panorama menakjubkan dan tradisi kaya, serta hasil alam melimpah, seperti sagu.

syuting program film dokumenter Jelajah berjudul *The Last Guardian of Sago*. Di sana kami mengabadikan aktivitas keseharian warga dalam pengolahan sagu, hingga kemudian dimanfaatkan menjadi berbagai pangan berbahan lokal. Mari kita simak ceritanya.

Dengan banyaknya pohon sagu menjadikan hampir sebagian besar masyarakat Negeri Rutong berprofesi sebagai petani sagu secara turun temurun dan merupakan salah satu mata pencaharian mereka selain nelayan. Tidak hanya itu, panorama laut biru yang membentang luas menyatu dengan langit cerah. Keindahan ini membuat Rutong menjadi destinasi yang sempurna untuk para pecinta fotografi dan pencari ketenangan. Akses menuju Negeri Rutong cukup mudah. Dari pusat Kota Ambon, perjalanan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan pribadi.

Tim Humas BPOM berkesempatan menyambangi Negeri Rutong untuk

01



“Harapannya adalah partisipasi mereka di dalam seluruh aspek pembangunan terkait ekowisata sagu ataupun hutan sagu ini bisa membuat masyarakat terutama generasi muda terpenggil dan tersemangati karena semua yang dikerjakan untuk mereka.”

- Bapa Raja Negeri Rutong Reza Valdo Maspaitella -

Kekayaan Alam Pohon Sagu

Sagu merupakan salah satu sumber pangan lokal yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi, terutama di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku. Selain memiliki potensi sebagai alternatif pangan yang ramah lingkungan dan bergizi, sagu juga telah menjadi bahan pangan utama yang mendukung kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu.

Sayangnya meskipun memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan lokal, keberadaan tanaman sagu kini mulai terabaikan. Ketergantungan pada bahan pangan impor dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi faktor utama yang mengancam



Kawasan Eko Wisata Sagu Negeri Rutong di Kecamatan Leitimur Selatan, Ambon, Maluku.



Sosialisasi keamanan pangan desa oleh tim BPOM di Negeri Rutong, Ambon, Maluku.

eksistensi sagu sebagai pangan lokal di berbagai daerah, termasuk Ambon.

Bapa Raja Negeri Rutong Reza Valdo Maspaitella menceritakan budaya masyarakat Negeri Rutong. “Kita ini memiliki sebuah budaya, cara kita hidup dengan kondisi alam pantai dan gunung. Masyarakat akan naik ke dusun untuk berkebun saat air laut pasang, dan pada saat laut tenang barulah mereka melaut,” jelasnya kepada Tim Humas BPOM.

Uniknya di Negeri Rutong, sagu tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Lebih jauh dari itu, hamparan pohon sagu dimanfaatkan sebagai ekowisata hutan sagu. Destinasi wisata hutan sagu Negeri Rutong menyuguhkan kondisi hutan sagu dengan semua proses pengolahan sagu. Wisatawan dapat merasakan bagaimana membuat sagu secara tradisional. Pohon sagu tumbuh subur di lahan-lahan basah sekitar desa, dan menjadi salah satu sumber daya alam penting bagi masyarakat.

Sagu diolah menjadi berbagai macam makanan tradisional seperti papeda, bubur sagu, dan sagu lempeng. Selain itu, batang dan daun pohon sagu juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan, seperti dinding dan atap rumah. Keberadaan pohon sagu tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Sagu yang dulunya menjadi tumpuan hidup masyarakat, kini menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya. Tanaman sagu

memiliki nilai gizi yang tinggi sebagai pengganti beras, serta potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan global. Meskipun demikian, keberadaan sagu masih kurang dikenal dan dimanfaatkan secara maksimal, terutama di kalangan masyarakat urban.

Persoalan ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan pola konsumsi, tetapi juga kurangnya informasi dan kesadaran akan manfaat sagu sebagai pangan lokal yang berkelanjutan. Karena itu, BPOM hadir di Negeri Rutong untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan pangan, serta memberdayakan potensi yang ada sebagai bahan pangan lokal yang aman dan berkualitas.

Pendampingan UMKM Pangan

Sosialisasi tentang pangan yang aman masih menjadi salah satu fokus utama BPOM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan yang aman dan berkualitas. BPOM mengedukasi masyarakat termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tentang cara memilih bahan makanan dan memproduksi pangan aman dan bergizi.

Di Negeri Rutong, Balai POM di Ambon rutin berkunjung memberikan edukasi serta pembinaan kepada masyarakat dan UMKM setempat. Bahkan beberapa produk hasil UMKM di

desa ini telah mendapat nomor izin edar (NIE) dari BPOM. Di antaranya tepung sagu dan selai buah tomi tomi sebagai produk pangan berbahan lokal.

Dengan pendekatan ini, BPOM tidak hanya menasar pelaku usaha guna meningkatkan kepercayaan produsen dalam menghasilkan produk unggulan berbahan lokal yang berkualitas. Lebih dari itu juga kepada konsumen agar mereka lebih cerdas dalam memilih produk pangan. Dengan demikian masyarakat merasa lebih tenang mengonsumsi pangan lokal karena produk-produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang ketat. Pada akhirnya kepercayaan ini akan mendorong peningkatan konsumsi produk lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

BPOM berharap masyarakat dapat lebih mencintai dan peduli terhadap warisan alam Indonesia, serta mengapresiasi mereka yang telah berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang memberikan kehidupan bagi banyak orang. BPOM juga mengharapkan agar para pelaku UMKM dapat terinspirasi untuk memanfaatkan kekayaan bahan alam Indonesia, seperti sagu, dalam mengembangkan produk lokal yang inovatif dan bernilai tinggi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pangan Lokal Mendunia

Peran petani sagu pun menjadi sangat penting dan krusial bagi seluruh aspek keberlangsungan kelestarian hutan sagu. Dengan adanya mereka diharapkan bisa membuat masyarakat dan khususnya generasi muda dapat tersemangati dan tergugah untuk melanjutkan perjuangan melestarikan hutan sagu. Patut kita syukuri sampai dengan hari ini, di tengah gempuran modernisasi, para petani sagu tetap bertahan, setia pada tradisi dan kearifan lokal mereka.

Petani sagu Butje Telapary mengisahkan perjalanannya menjadi petani sagu untuk mengisi hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Baginya profesi ini adalah pilihan untuk melanjutkan pekerjaan orang tua karena tidak semua petani sagu lahir dari nurani yang dalam. "Kami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak," ceritanya.

02



" Kami menjadi petani sagu melihat dan mencontohkan teladan kebiasaan yang orang tua kami turunkan untuk generasi berikutnya. Bukan untuk kehidupan kelangsungan manusia saja, tapi untuk organisme yang lain dan kemuliaan nama Tuhan. "
- Petani sagu, Butje Telapary -

Namun perlu digarisbawahi bahwa budidaya sagu di Rutong tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam. Pohon sagu memiliki akar yang

kuat yang mampu menahan tanah dari erosi.

Sagu bisa menjadi salah satu bahan pokok ketahanan pangan lokal di Maluku dan memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Jika ini terlaksana maka seluruh lapisan masyarakat pelestari sagu pun akan menerima dampak baiknya. Seperti kesejahteraan petani juga akan lebih baik, sagu yang tadinya mulai ditinggalkan karena tidak menghasilkan, kini bisa memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Tentunya dengan menyesuaikan permintaan pasar, diolah dan dikembangkan, sagu dapat menjadi produk pangan olahan yang memiliki banyak peminat.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan budaya lokal. Budidaya sagu di Rutong merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestarian budaya nusantara. ■



Pemuda pemudi Negeri Rutong yang hidup berdampingan dengan alam hutan sagu.



Masyarakat mengolah sagu menggunakan alat tradisional di dalam hutan sagu Negeri Rutong, Ambon.

Pangan Aman MUDIK NYAMAN | Capek

Mudik Tenang Menyenangkan

TIPS MEMBELI PANGAN SIAP SAJI

- 1 Perhatikan kebersihan lokasi dan penjual pangan.**
Tidak berjualan di dekat pembuangan atau selokan serta menggunakan alat masak yang bersih.
- 2 Perhatikan kebersihan pangan yang dijual.**
Pangan diletakkan di tempat tertutup terlindung dari debu atau benda asing lainnya.
- 3 Pastikan pembungkus/ wadah yang digunakan bersih dan aman.**
Bukan kertas bekas atau kresek hitam.
- 4 Hindari membeli makanan/minuman yang menggunakan es batu balok.**

TIPS MEMBELI PANGAN DALAM KEMASAN

Cek **KLIK**
Cek **Kemasan**
Cek **Label**
Cek **Izin Edar**
Cek **Kedaluwarsa**
dulu sebelum
Belanja

Sebelum **Mudik**
Pastikan Kondisi Tubuhmu
Sehat yaa..



Katanya, kata dia, kata doi ...
Jangan mudah percaya katanya,
sebelum mendapat informasi obat dan makanan
dari sumber yang valid dan terpercaya.

**..bukan
kata
orang,
pastikan..**



Yuk, tonton sekarang!
di **Podcast Kata BPOM**

pom.go.id [@bpom_ri](https://www.instagram.com/bpom_ri) [@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri) [@bpom.official](https://www.facebook.com/bpom.official)

The background features a faint, golden-hued illustration of a mosque with multiple domes and minarets. In the foreground, there are stylized, colorful waves in shades of green and yellow. Three decorative lanterns are scattered across the page: one large green and yellow lantern on the left, and two smaller green and yellow lanterns on the right. The main title is written in a large, elegant, green script font.

Selamat Idulfitri

1 Syawal 1446 Hijriah

***Taqabbalallahu minna wa minkum
shiyamana wa shiyamakum***